



DOKUMEN RENJA 2027

**DINAS PERINDAGKOP
DAN UKM KAB.WAJO**

Jl.Bau Baharuddin No. Sengkang

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kami, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2027.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Wajo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Wajo Tahun 2027 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Agar dalam pelaksanaan program dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wajo, kami melaksanakan sinkronisasi program dengan Perangkat Daerah Lintas Sektor, Provinsi Sulawesi-Selatan, kementerian maupun lembaga di tingkat pusat.

Keberhasilan dalam penyusunan Rencana Kerja TA. 2027 ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja TA. 2027 ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja tahun yang akan datang.

Tersusunnya RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program dan kegiatan Dinas sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM.

Sengkang, 07 Maret 2026

Plt.Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab,Wajo

Drs.H.ANDI CAKUNU,,M.Si

NIP. 19690424 199403 1 008

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD.....	II-12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II-23
2.2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi	II-23
2.2.2. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	II-39
2.2.3. Pengolahan Data Informasi	II-44
2.2.4. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-57
2.3 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.....	II-63
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-73
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-85
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	III-96
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM	IV-98
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan OPD terhadap TPB/SDG	IV-98
4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-102
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	
5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	V-113
5.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	V-113
5.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	V-114
5.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal SPM	V-114
5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	V-115
BAB VI PENUTUP	VI-117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Wajo	17
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo	43
2.3	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	62
2.4	Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2027 Kabupaten Wajo	64
2.5	Usulan program, kegiatan dan Sub.Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2027 Kabupaten Wajo	73
2.6	Usulan Program, kegiatan dan Sub.Kegiatan dari Masyarakat tahun 2027 Kabupaten Wajo	74
2.7	Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD Kabupaten Wajo	75
3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	94
3.2	Tujuan dan Sasaran	96
4.1	Dukungan Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan OPD terhadap SPM Tahun 2027	97
4.2	Dukungan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGs Tahun 2027	98
4.3	Rancangan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan OPD tahun 2027 dan Perkiraan Maju tahun 2028 Kabupaten Wajo	105
5.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo	112
5.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo	113
5.3	Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo	114
5.4	Penetapan TPB/SDGs Perangkat Daerah Kabupaten Wajo	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai daerah. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana pembangunan pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 27 ayat 1 mengamanatkan bahwa PD menyusun Renja-SKPD

yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Wajo, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta prediksi masalah yang akan dihadapi. Selain itu Renja ini juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam pembinaan dan pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan usaha kecil di Kabupaten Wajo yang menjadi bahan utama RKPD serta prakiraan anggaran yang dibutuhkan. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Wajo.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana dan program, Rancangan RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur.

Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun awal dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya..

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya, Hasil Evaluasi

Renja Tahun Berjalan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan Renja

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 33. Peraturan Bupati Wajo No. tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun Nomor 75);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2027 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja PD Dinas Perindagkop dan UKM (RENJA) Kabupaten Wajo Tahun 2027 adalah :

1. Memberikan pedoman dan arah pembangunan Kabupaten Wajo dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Renja dimaksudkan sebagai landasan penyusunan Renja;
5. Terdokumentasikannya kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun 2027 adalah :

1. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;

2. Tersedianya rencana prioritas program dan kegiatan prioritas; dan
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Kabupaten Wajo Tahun 2027, disusun mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Kab.Wajo, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo serta Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Renja OPD Kabupaten Wajo Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuannya:

1. Memberikan uraian ringkasan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Memberikan uraian ringkasan tentang sasaran penyusunan dokumen Renja DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar setiap bab di dalamnya.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2.2.1 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi
 - 2.2.2 Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.2.3 Pengolahan Data dan Informasi
 - 2.2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA OPD.

BAB IV RENCANA RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS

4.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2027

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan. Pendahuluan Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2027 Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kenijakan. Kemudian penjelasan mengenai kegiatan yang bertambah atau berbeda nama dari Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir priode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai melalui Renstra.

5.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal

5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. dan
3. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Ditengah keterbatasan anggaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo telah memenuhi capaian kinerja Program sebanyak 13 Program tahun 2025 sebesar 100%. Sehingga secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo pada tahun 2025 adalah berpredikat sangat baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

Dalam urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025, mendapat dukungan Anggaran dari APBD Kabupaten Wajo sebesar **Rp. 10.088.316.164** terdiri dari Belanja tidak Langsung sebesar **Rp 6.334.120.414,-** dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.711.005.592,- atau 90,16% dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran untuk Belanja Langsung 2025 berjumlah sebesar **Rp 3.754.195.750,-**. realisasi serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.416.046.878,- atau 90,99%.

Pendapat Asli Daerah (PAD) 2025 berjumlah sebesar **Rp 7.495.548.000,-** dengan Realisasi **Rp. 4.814.134.000,-** atau 64,23% .

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kab.Wajo pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan. Adapun Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan
A	Pendapatan	7.495.548.000,00	4.814.134.000,00	64,23%
	Pendapatn Asli Daerah	7.495.548.000,00	4.814.134.000,00	64,23%
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.495.548.000,00	4.814.134.000,00	64,23%
B	Belanja	10.088.316.164,00	9.127.052.470,00	90,47%
	Belanja	10.216.179.582,00	9.603.390.956,00	94,00%
	Belanja Gaji	6.334.120.414,00	5.711.005.592,00	90,16%
	Belanja Operasi	2.849.554.750,00	2.614.489.878,00	91,75%
	Belanja Modal	904.641.000,00	801.557.000,00	88,60%

Adapun tingkat capaian Program Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2025 sampai dengan Akhit Triwulan IV seperti yang ada dalam tabel sebagai berikut :

N D	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan
	Program Penujng Urusan Pemerintah Daerah	7.289.794.914	6.633.055.328	90,99%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.883.800	31.732.449	95,85%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.780.000,00	6.481.262	95,59%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.124.000	3.265.287	98,23%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.124.000	3.265.287	98,23%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Sinhisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	2.143.535	97,43%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.450.000	3.653.710	90,22%
	Pelaksanaan Pengumpulan Statistik Semester	955.000	872.948	91,45%
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	2.150.000	2.250.000	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.339.579.414	5.716.447.252	90,17%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.134.120.814	5.711.005.592	90,16%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.529.000	4.911.680	99,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Balasam/Tranvulus/Semesteras SKPD	530.000	530.000	100,00%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	16.489.800	16.437.103	99,68%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16.489.800	16.437.103	99,68%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.500.400	8.499.417	99,99%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.500.000	8.499.417	99,99%
	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.872.500	215.379.769	98,86%
	Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik/Pemeragaan Keagunan Kantor	2.900.000	2.972.147	99,14%
	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	2.497.700	2.384.613	95,47%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.022.500	14.460.303	96,26%
	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan	-		
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.355.200	195.562.706	99,09%
	Penyediaan Jasa Pemungjng Urusan Pemerintahan Daerah	563.619.800	534.467.109	94,83%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.509.800	32.016.808	98,48%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	67.540.211	93,81%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.110.000	434.915.000	94,73%
	pereliharaan barang Milik Daerah Pemungjng Urusan Pemerintahan Daerah	120.850.400	119.892.227	99,21%
	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pereliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.800.000	89.436.227	99,16%
	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.800.000	11.967.508	99,73%
	Pereliharaan/Rohablihasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	18.950.000	18.700.500	99,15%
	Program Pelaksana Jasa Usaha Smpun Pinjam	406.495.000	406.475.000	100,00%
	Pembelian Jasa Usaha Smpun Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.495.000	406.475.000	100,00%
	Pin Rikat Perembas Jasa Usaha Smpun Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Perbaris dan Kantor Bas Koperasi Smpun Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	406.495.000	406.475.000	100,00%
	Program Pengawasan dan Pemere Dasa Koperasi	54.211.000	53.018.500	99,28%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Smpun Pinjam, Unit Smpun Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.211.000	53.018.500	99,28%
	Pelaksanaan Pemere Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.211.000	53.018.500	99,28%
	Program Pradialan Kesehatan RSP/USP Koperasi	12.452.000	12.452.000	99,92%
	Peralatan Kesehatan Koperasi smpun pinjam/Unit Smpun Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Sata) Daerah Kabupaten/Kota	12.452.000	12.452.000	99,92%
	Pelaksanaan Peralatan Kesehatan RSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12.452.000	12.452.000	99,92%
	Program Pembebasan Usaha, Meringk, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	482.299.250	340.151.122	73,90%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendanaan, pelatihan, Perbaikan/Pengakses Kelengkapan dan koordinasi dengan Pemangjng Otonotras	482.299.250	340.151.122	73,90%
	Peralihan Usaha Mikro	832.460.000	217.015.000	65,32%
	Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	10.100.000	17.700.000	97,79%
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	8.739.250	8.140.785	93,15%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta Kapabilitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000	96.495.327	96,50%
	Program Pengembangan UMKM	149.838.000	147.673.990	98,56%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan pemberian pembiayaan skala usaha Perjaha ondi Bas	149.838.000	147.673.990	98,56%
	Pengembangan Usaha Mikro	10.472.300	17.375.700	94,06%
	Produksi dan Pengalasan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	131.365.000	130.297.990	99,19%
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.128.397.900	950.200.234	85,30%
	Pembangunan dan Pengalasan Sarana Distribusi Perdagangan	941.404.000	839.302.424	88,11%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	920.171.000	826.481.136	88,97%

Facilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.096.000	7.085.614	99,85%
Identifikasi Terhadap Lembaga dan Komoditas Potensi Sistem Rasi Gudang di Wilayah Kabupaten/Kota	5.037.000	5.036.484	99,99%
Pemantauan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Berjaya	181.733.000	119.104.800	65,54%
Pembinaan dan Pengrombuan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	181.733.000	119.104.800	65,54%
Program Stabilitas Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	16.617.000	16.575.858	99,75%
Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.617.000	16.575.858	99,75%
Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.487.000	5.446.734	99,27%
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berlandaskan pada 1 (satu) Kabupaten/Kota	11.130.000	11.129.124	99,99%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	341.626.700	332.415.520	97,25%
Penyubudayaan Promosi dan Misi Dagang Bagi Pihak Ekspor Unggulan yang Terdaftar Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.626.700	332.415.520	97,25%
Pemerat Dagang Nasional	341.626.700	332.415.520	97,25%
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	31.386.600	30.295.683	96,53%
Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera-tera ulang dan pengawasan	31.386.600	30.295.683	96,53%
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-Tera Ulang	25.199.800	24.013.119	95,81%
Pengawasan/Pengalihan Metrologi Legal	5.487.000	5.482.464	99,92%
Program Pengawasan dan Pemastian Produk dalam Negeri	7.676.800	4.792.499	62,43%
Pelaksanaan Prosesi Pemastian dan Peningkatan Pengawasan Daerah dalam Negeri	7.676.800	4.792.499	62,43%
Pelaksanaan Prosesi Pengawasan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7.676.800	4.792.499	62,43%
PROGRAM PERENCANAAN DAN PERBANGUNAN INDUSTRI	103.666.100	100.754.163	97,19%
Pengurusan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	103.666.100	100.754.163	97,19%
Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	41.871.600	41.197.543	98,16%
Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	17.938.500	16.105.500	89,78%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Peningkatan Industri dan Peran Serta Masyarakat	43.756.000	43.451.120	99,30%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10.705.000	10.383.884	97,00%
Penyediaan Informasi Industri melalui IHI, IPDI, LKDI dan IPIU Keseluruhan Kabupaten/Kota	10.705.000	10.383.884	97,00%
Facilitas Pengumpulan, Pengolahan Data, Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain-lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Data Industri Nasional (SINAS)	8.110.000	7.788.953	96,04%
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS	2.595.000	2.594.931	100,00%
	10.088.316.164	9.127.052.470	

Selain Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2025 memuat Target Pendapatan sebagai Berikut :

A. Pendapatan

Target Pendapatan Tahun 2025 ditetapkan sebesar **Rp. 7.495.548.000**, terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Pasar dengan target sebesar **Rp. 4.814.134.000,-** dengan Realisasi **Rp. 7.495.548,-** . atau **64,44%**
2. Retribusi Jasa Usaha dengan target sebesar **Rp. 25.000.000,-** dengan Realisasi **Rp. 0,-** atau **0 %**

1. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan:

Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab.Wajo . Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Ada kegiatan yang memang tidak tercapai target kinerja dan ada pula yang melebihi target, untuk yang tidak dapat mencapai target yang

telah ditetapkan salah satu faktor utama penyebabnya adalah dikarenakan tidak tersedianya anggaran yang berdampak tidak terdaniannya kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan pada Renja tahun 2025.

Dan salah satu penyebab tidak terpenuhinya target PAD Pelayanan Pasar pada tahun 2024 adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana terjadinya keterbatasan sumber daya atau pertugas pelaksana operasional dilapangan, adanya beberapa pasar masih dalam tahap pembangunan/ rehabilitasi, masih banyaknya tingkat kebocoran atau kelolosan dimana belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya sarana dan prasarana untuk oprasional dilapangan.

Ada beberapa alasan PAD Retribusi Jasa Usaha belum ada Realisasi pada tahun 2025 di UPTD persuteraan Alam antara lain:

1. Saat ini kami masih fokus dalam kegiatan pembenahan di sektor hulu. Walaupun kegiatan melekat dibidang industri namun kegiatan pengawasan penanaman murbei tetap berada di kami.
2. Sebagaimana diketahui bahwa target PAD UPT Sutera disahkan pada awal tahun 2025. Padahal kami mengusulkan retribusi sejak tahun 2018/2019. Sejak akhir tahun 2021 dan awal 2022 sampai dengan sekarang kami telah berusaha mensosialisasikan layanan UPT kepada para pengusaha kecil dibidang pertenunan agar dapat memanfaatkan layanan kami. Namun ternyata tarif yang berada dilapangan saat ini jauh dibawah tarif di yang ditetapkan. Ini terjadi karena pengusulan dan survei kami lakukan untuk penarikan retribusi di tahun 2018. Jadi sudah terjadi koreksi harga dalam rentan waktu hingga sekarang dikarenakan adanya pandemi dan faktor lain juga. Pengusaha besar yang juga memiliki peralatan yang sama memilih menurunkan harga tarif mereka demi menarik pelanggan.
3. Pengadaan peralatan pertenunan dilakukan tahun 2016. Jadi dalam selang waktu tersebut sudah ada beberapa peralatan yang butuh perhatian dan perawatan. Peralatan yang masih dapat kami gunakan dengan baik hanya sisa mesin hani mesin pencelupan. Namun begitu Di tahun 2021 ada IKM seperti Kurnia Silk dan Hidayat Silk menggunakan mesin kami namun saat itu tidak kami kenakan juga tarif karna belum ada pengesahan Retribusi resmi yang kami usulkan saat ini kami juga belum mendapatkan SKRD yang bisa kami gunakan dan sudah dikoordinasikan ke bendahara barang sejak tahun lalu sebagai persiapan penarikh tarif. Namun beberapa kendala internal di dinas dan

bendaahara barang kami terganti baru kami usulkan lagi pengadaan SKRD untuk UPTD Sutera Namun sampai sekarang belum juga tersedia.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program OPD

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM yang kurang maksimal dan dukungan anggaran yang masih kurang sehingga perlu dilakukan terobosan kegiatan yang tidak hanya mengandalkan APBD.

3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan menjadi terobosan dana agar tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Adapun Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Wajo Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD dan PENCAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN 2025

Nama OPD : DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB.WAJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2025 (Akhir Priode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
2.17.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (DISPERINDAGKOP) (Persentase)									
2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (Persentase)									
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3	3	100%	3	8	400,00%	
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300,00%	
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	45	0	75	75	100%	0	75	166,67%	
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0	2	2	100%	2	4	400,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2029 (Akhir Priode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
2.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu (Persentase)									
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	272	57	57	100%	57	386	665,52%	
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	0	3	3	100%	0	3	75,00%	
2.17.01.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (Persentase)									
2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
2.17.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani (Persentase)									
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	1	1	100%	0	1	100,00%	
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	0	2	0	0%	0	0	0,00%	
2.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (Persentase)									
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	10	15	15	100%	15	40	266,67%	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	10	20	20	0%	20	50	250,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2029 (Akhir Priode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	8	20	20	100%	20	48	240,00%	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	-	0%	0	1	100,00%	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	44	12	12	100%	12	68	566,67%	
2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi (Persentase)									
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	22	1	0	0%	3	25	625,00%	
2.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia (Persentase)									
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	36	300,00%	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	100%	0	24	200,00%	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	12	100%	12	36	300,00%	
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara (Persentase)									
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	20	10	20	20	100%	20	50	250,00%	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	3	7	7	100%	7	17	242,86%	
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
2.17...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2029 (Akhir Priode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
2.17.02..	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi (Persentase)									
2.17.02.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan (Koperasi)									
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	5	20	190	190	100%	0	210	4200,00%	
2.17.03..	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)									
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa (Koperasi)									
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	400	0	200	200	100%	35	235	58,75%	
2.17.04..	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Persentase)									
2.17.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya (Koperasi)									
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	200	10	40	40	100%	35	85	42,50%	
2.17.07..	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM Wirasaha Baru (Persentase)									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2029 (Akhir Priode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan (UMKM)									
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	10	0	5	5	100%	0	5	50,00%	
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50	0	50	50	100%	18	68		
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	680	100	520	520	100%	130	750		
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	30	0	84	84	100%	0	84		
2.17.08..	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan promosi produk UMKM (Persentase)									
2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan dengan Orientasi skala usaha menjadi skala kecil (UMKM)									
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	35	0	4	4	100%	0	4	11,43%	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	35	55	5	5	100%	0	60	171,43%	
	Urusan Pemerintahan Pilihan										
3.30...	URUSAN PERDAGANGAN										
3.30.03..	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Ketersediaan sarana distribusi perdagangan (Persentase)									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2029 (Akhir Priode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
3.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola (Unit)									
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2	5	4	4	100%	0	9	31,25%	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	33	14	50	50	100%	0	64	31,25%	
3.30.03.2.01.0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (Laporan)	1	0	1	1	100%	0	1	31,25%	
3.30.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan (kali)									
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
3.30.04.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Persentase)									
3.30.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali (Bahan Pokok)									
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (Laporan)	12	12	12	12	100%	1	25	208,33%	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (Laporan)	12	0	1	1	100%	1	2	16,67%	
3.30.05.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Dagang yang diselenggarakan (Persentase)									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2029 (Akhir Priode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
3.30.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan (kali)									
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	18	15	15	15	100%	15	45	250,00%	
3.30.06..	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang berstandarisasi (Persentase)									
3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan (kali)									
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera-Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	2070	330	750	750	100%	350	1430	69,08%	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	550	100	150	150	100%	0	250	45,45%	
3.30.07..	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri (Persentase)									
3.30.07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri (UMKM)									
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	25	0	20	20	100%	0	20	80,00%	
3.31...	URUSAN PERINDUSTRIAN										
3.31.02..	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri (Persentase)									
3.31.02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota (Laporan)									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2025	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan OPD Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan 2026	Perkiraan Realisasi Capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025		Catatan
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)*	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	(12)
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	1,28%	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	
3.31.04.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas (Persentase)									
3.31.04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas (Data)									
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	0	1	1	100%	1	2	200,00%	
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300,00%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab.Wajo Dinas Perindustrian, Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil, dan Menengah adalah: melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati..

Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 27 dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah .
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.2.1 Tugas, fungsi dan Kedudukan Organisasi

A. Kelompok Jabatan Struktural

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai **tugas pokok yaitu :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan di lingkup DISPERINDAGKOP dan UKM serta membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai **Fungsi yaitu :**

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Disperindagkop dan UKM; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai

tugas pokok yaitu :

Merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas;

Tugas : merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, pegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

- a. penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

Tugas Pokok:

Merencanakan Kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Mengendalikan rencana kinerja tahunan;
- e. Menyiapkan bahan serta dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Disperindagkop dan UKM meliputi pemeliharaan gedung, Pemeliharaan Peralatan Kantor, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;

- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran Disperindagkop dan UKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;
- h. Menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- i. Memberi tugas kepada bawahan;
- j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- k. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- l. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai

Tugas pokok :

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbag keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

Uraian Tugas yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang keuangan;
- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melaksanakan penggajian pegawai di lingkup Disperindagkop dan UKM;

- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah lingkup Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkup Disperindagkop dan UKM;
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap keuangan di lingkup Disperindagkop dan UKM;
- h. Menyusun Laporan Keuangan akhir tahun Disperindagkop dan UKM;
- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- k. Menyediakan data dan informasi terkait dengan bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- l. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis di subbag keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di subbag keuangan;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup subbag keuangan;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup subbag keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

'3. Bidang Perdagangan:

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemeterologian yang mempunyai

Tugas pokok :

membantu Kepala Diperindagkop dan UKM merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang

sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Pasar:

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang mempunyai tugas:

Tugas : membantu Kepala Disperindagkop dan UKM merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasaranan pasar;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasaranan pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaa tugas dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan saranan dan prasarana pasar; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

`5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas Pokok :

Tugas : membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang industri tekstil, aneka dan elektronika telematika, industri agro, kimia dan hasil hutan, dan industri logam, mesin dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang industri tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industri logam, mesin dan alat transportasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang industry tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industry logam, mesin dan alat transportasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang industry tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industry logam, mesin dan alat transportasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

`6. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi yang mempunyai tugas tugas pokok :

Tugas : membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan kelembagangannya, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok :

Tugas : membantu Kepala Disperindagkop dan UKM dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- d. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Adapun kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo.

1. Pengawas Koperasi Ahli Muda

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda merupakan salah satu jabatan fungsional yang ada dalam lingkup pengawasan koperasi di Indonesia. Jabatan ini memiliki kedudukan dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan tugas pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Jabatan Fungsional dari **Pengawas Koperasi Ahli Muda** adalah:

Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi
3. Menelaah rencana kerja tahunan pengawasan koperasi
4. Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi
5. Menelaah rencana kerja bulanan pengawasan koperasi
6. Melakukan reviu rencana program/kegiatan bulanan dan tahunan pengawas koperasi
7. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan kerja pengawasan koperasi
8. Menyusun dan mengidentifikasi keanggotaan tim pengawas koperasi
9. Melakukan koordinasi tim pengawasan koperasi internal dalam rangka persiapan pemeriksaan.
10. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan legal terhadap jati diri koperasi.
11. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan usaha koperasi.
12. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan koperasi;
13. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan legalitas koperasi;
14. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan organisasi koperasi;
15. Melakukan analisis hasil pemeriksaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi;

16. Melakukan analisis hasil pemeriksaan penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi;
17. Melakukan analisis hasil pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan koperasi;
18. Melakukan analisis hasil pengawasan terhadap kasus koperasi bermasalah;
19. Melakukan analisis hasil *audit sampling* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra pengawasan;
20. Melakukan reviu *data analysis* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra- pengawasan;
21. Melakukan analisis hasil preliminary analysis terkait data objek pengawasan koperasi;
22. Melakukan analisis hasil pengawasan koperasi di daerah terpencil atau terbelakang daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam dan bencana social atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
23. Melaksanakan pembimbingan dalam pelaksanaan tindakan pengawasan khusus koperasi;
24. Melakukan reviu laporan hasil pengawasan kasus koperasi bermasalah;
25. Melakukan reviu hasil penyusunan laporan hasil pemeriksaan koperasi;
26. Melakukan reviu pemetaan hasil pemeriksaan koperasi;
27. Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pengawasan koperasi;
28. Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
29. Mengusulkan rekomendasi penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
30. Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
31. Mengusulkan rekomendasi penghapusan sanksi administratif koperasi;
32. Melakukan analisis hasil koordinasi pengawasan dengan instansi penegak hukum;
33. Melakukan supervisi pemberian keterangan dalam mendukung penyidikan tindak pidana yang melibatkan koperasi;
34. Melakukan tugas sebagai saksi di proses peradilan kasus koperasi;
35. Melakukan supervisi proses kesaksian di proses peradilan kasus koperasi;
36. Melaksanakan tugas sebagai ahli dalam penanganan kasus koperasi;
37. Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;

38. Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
39. Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
40. Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
41. Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengawas internal koperasi;
42. Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengurus koperasi;
43. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi di tingkat provinsi;
44. Melaksanakan kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi terkait; dan;
45. Melakukan supervisi kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi terkait;

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Jabatan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan, secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Jabatan Fungsional dari **Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan** adalah: Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan

Tugas Pokok :

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Menganalisis data potensi wilayah usaha indag;
3. Sebagai penyaji dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
4. Sebagai narasumber dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
5. Merumuskan alternative pemecahan masalah usaha indag;
6. Merumuskan kebutuhan penyuluhan usaha indag;
7. Sebagai narasumber dalam pembahasan faktor-faktor penentu;
8. Menyusun konsep program penyuluhan usaha indag;
9. Sebagai pembahas dalam diskusi konsep program penyuluhan usaha indag;

10. Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan pedoman penyuluhan indag;
11. Menyusun konsep pedoman penyuluhan indag;
12. Sebagai penyaji diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;
13. Sebagai pembahas diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;
14. Merumuskan konsep pedoman penyuluhan indag;
15. Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan juklak/juknis penyuluhan indag;
16. Menyusun konsep juklak/juknis penyuluhan indag;
17. Merumuskan konsep juklak/juknis penyuluhan indag;
18. Mengumpulkan dan mengolah bahan/data informasi bahan penyempurnaan kebijaksanaan;
19. Menyusun rencana kerja tahunan;
20. Menyusun materi penyuluhan bidang usaha indag;
21. Melakukan kunjungan tata muka/anjingsana kepada pengusaha bidang usaha indag;
22. Melakukan kunjungan tatap muka kepada kelompok usaha indag;
23. Sebagai moderator temu lapangan/temu wicara dengan usaha indag;
24. Menyusun proposal kegiatan temu wicara dengan usaha indag;
25. Menjadi penyaji dalam temu wicara dengan usaha indag;
26. Menyusun proposal temu bisnis dengan usaha indag;
27. Menyusun laporan hasil temu bisnis dengan usaha indag;
28. Sebagai narasumber kegiatan mimbar sarasehan bidang usaha indag;
29. Membuat materi/modul untuk pelatihan usaha indag kecil pasar modern;
30. Mengajar dalam pelatihan/kursus usaha indag kecil pasar modern;
31. Melakukan kegiatan penyuluhan melalui media elektronika radio;
32. Melakukan layanan jasa konsultasi usaha indag secara langsung;
33. Melakukan desiminasi teknologi baru usaha indag menengah;
34. Menyusun petunjuk informasi indag dalam bentuk media elektronika sound slide;
35. Membimbing analisis data penyusunan proposal usaha indag;
36. Menyusun rancangan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
37. Melakukan penelitian lapangan dalam rangka penyusunan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
38. Sebagai penyaji dalam presentasi rancangan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);

39. Menyusun studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
40. Membimbing penyusunan rencana tahunan usaha indag kecil pasar moder;
41. Bimbingan penerapan system manajemen mutu usaha indag kecil pasar modern;
42. Bimbingan penerapan manajemen lingkungan pengolah limbah fisika, kimia, sosekbid ISO-14000 bidang usaha indag kecil pasar modern;
43. Melakukan diagnose dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha indag;
44. Mengolah data hasil diagnosa dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha indag;
45. Melakukan sosialisasi ketentuan ekspor/impor;
46. Membimbing penyelesaian dokumen ekspor/impor;
47. Menyusun kerangka acuan dan studi AMDAL berdampak penting;
48. Menyusun dokumen AMDAL berdampak penting;
49. Membimbing calon wirausaha indag dan atau incubator;
50. Membuat evaluasi terbentuknya wirausaha baru indag daan atau incubator;
51. Mengolah data profil investasi;
52. Menyusun buku profil investasi;
53. Menyajikan informasi peluang pasar usaha indag;
54. Menyusun agenda permasalahan dalam rangka negosiator bisnis;
55. Menyusun laporan hasil negosiasi bisnis;
56. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan system pengawasan;
57. Menyusun landasan (AD/ART)/ pedoman institusi usaha indag;
58. Menyusun katalog dan bahan promosi pameran indag;
59. Membuat laporan hasil pameran indag;
60. Menyusun rencana kegiatan evaluasi;
61. Sebagai pembahas diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag;
62. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag;
63. Pengembangan profesi;
64. Mengikuti Seminar/Lokakarya dibidang Usaha Indag;

3. Penera Ahli Pertama

Jabatan Fungsional Penera Ahli Pertama adalah salah satu jenjang dalam jabatan fungsional **Penera**, yaitu pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan **pengukuran, penakaran, penimbangan, dan pengujian alat ukur, takar, timbang,**

dan perlengkapannya (UTTP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.

Fungsi Jabatan Fungsional dari Penera Ahli Pertama adalah:

Melakukan pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/ tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

Tugas Pokok :

1. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa;
2. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang;
3. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya;
4. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu;
5. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya;
6. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume;
7. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH;
8. Melakukan pengujian UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan atau Izin Tipe;
9. Pengelolaan Cap Tanda Tera;

C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan teknik operasional pengelolaan sutera alam dan membantu pemerintah dalam mempromosikan komoditi unggulan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan teknis operasional penelitian, pengajuan, pemeriksaan tera, dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya, pengelolaan standar kemetrolgian serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang kemetrolgian.

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Disperindagkop dan UKM dalam mengimplementasikan kebijakan secara teknis operasional.

Jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang tugas Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur denga Peraturan Bupati.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Wajo disesuaikan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

STRUKTUR ORGANISASI

PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 37 TAHUN 2023

KEPALA DINAS
ANDI ASO ASHARI, ST., M.Si.
NIP.19651231 198612 1 007

SEKRETARIS
MUH. TAHIR TAJANG, SP., M.Si.
NIP. 19721005 200604 1 030

KEPALA SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
FITRIYANI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19840705 200502 2 001

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN
MAS'ANY, S.Sos.
NIP. 19780217 200701 2 012

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
YUMASDI RUSTAN, S.Sos.
NIP. 19820429 200604 1 006

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
HJ. ANDI SUSIANA, S.Sos.
NIP. 19731010 199402 2 001

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
H. YUNUS, S.Sos.
NIP. 19731231 201001 1 024

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
MUHAMMAD DARWIS, S.E., M.Si.
NIP. 19851212 201001 1 012

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
SUDIRMAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19661110 199003 1 011

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM
ANDI RAHMAYANTI, S.E., M.Si.
NIP. 19831221 200902 2 005

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
MUHAMMAD NATSIR, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690908 200604 1 011

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
SUDIRMAN, S.E.
NIP. 19690502 200701 1 025

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
TIEN PRATIWI MULIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19810419 200803 2 001

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
ABDULLAH, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730304 199603 1 003

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
YULIANA, S.T., M.T.
NIP. 19750507 200902 2 002

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
MUHLIS, S.Sos., M.Si.
NIP. 19771225 200701 1 012

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
SUKRI, S.H.
NIP. 19731231 200803 1 002

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
NIDYA YANTI, S.T.
NIP. 19811020 201101 2 001

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA
ANDI TENRI PAKKUA HASRA, S.E.
NIP. 19671128 201406 2 001

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
ASRAD, S.Sos.
NIP. 19820714 200902 1 003

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA
IRFAN, S.T.
NIP. 19720623 201101 1 001

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

UNIT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (UPTD)
--

UPTD PERSUTERAAN ALAM DAN PUSAT PROMOSI SENTRA IKM

Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM
MUHAMMAD ANAS, S.E, M.A.P.
NIP. 19810210 200701 1 003

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM
ANDI HASNIWATI, S.Pi.
NIP. 19740101 200801 2 009

UPTD METROLOGI LEGAL

Kepala UPTD Metrologi Legal
Hj. SUGISWATI, S.T., M.Si.
NIP. 19740914 201001 2 002

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal
ANDI ALAMSYAH SAID, S.Sos.
NIP. 19780923 200801 1 009

2.2.2. Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan kajian terhadap capaian pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah,serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo.

Tugas Pokok DISPERINDAGKOP dan UKM tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab.Wajo adalah: melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Pelayanan

1. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur,Takar,Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

UPTD Metrologi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 82 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis metrologi legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo

Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 182 Tahun 2019 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 182).

Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain :

Ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengajuan. Kegiatan Tera/Tera ulang UTTP di laksanakan oleh UPTD Kemetrolagian dengan memberikan penyuluhan tentang kemetrolagian, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Kabupaten Wajo. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (Produsen dan Konsumen) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2. Pelayanan UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM.

UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2020 . UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi IKM merupakan unit pemeliharaan ulat sutera (hulu) hingga menghasilkan benagn sutera/tenun sutera/tekstil lainnya (hili) dan pusat pusat promosi bagi sentra IKM yang ada di daerah.

UPTD Persuteraan Alam dan Pusat promosi IKM dibentuk bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Produk Persuteraan Alam Daerah. Dimana jenis pelayanan yang akan dilakukan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kegiatan pemeliharaan dan budidaya ulat sutera, pertenunan dan pengujian mutu sutera berupa kain atau benang, dan Promosi produk sutera para pelaku sentra IKM di daerah.

3. Pelayanan UPTD Pasar.

Pelayanan UPTD Pasar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Orgabisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pasar. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan teknis operasional bidang Pasar.

UPTD Pasar dibentuk bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasar tradisional yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah , Memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada pedagang dan masyarakat pengguna pasar. Meningkatkan pendapatan asli

daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi pasar dan pengelolaan aset pasar. Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar, termasuk pengaturan zonasi pedagang, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Perindagkop dan UKM atau Dinas terkait dalam hal pengelolaan pasar di tingkat teknis operasional.

B. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo yaitu :

- a. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh UPTD Kemeterologian Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo pada setiap hari kerja. Pelayanan Kemeterologian ini selain di Kantor, juga dilakukan dengan Mobil untuk Menjangkau ke pelosok Kab.Wajo.
- b. Pelayanan UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM. Pelayanan persuteraan alam dan pusat promosi sentra IKM dilaksanaka oleh UPTD Persuteraan alam dan pusat promosi sentra IKM pada setiap hari kerja.
- c. Pelayanan Pertenunan Tosora
- d. Pelayanan UPTD Pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UKM Kab.Wajo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo yang tertuang dalam Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UKM Kab.Wajo Tahun 2025-2029.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UKM Kab.Wajo maka pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo tetap berpedoman pada indikator kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab.Wajo berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo dilihat pada tabel 2.2 seperti dibawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perindagkop dan UKM Kanupaten Wajo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/	Target					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	
A.	PERINDUSTRIAN													
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB			4,40%	4,60%	4,80%	4,95%	5,20%	4,26%	4,24%	4,60%	4,80%		
2	Pertumbuhan Industri			4,80%	4,95%	5,35%	6,40%	6,90%	3,36%	1,75%	4,95%	5,35%		
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin			4,20%	6,40%	8,40%	10,75%	12,10%	3,16%	0%	6,40%	8,40%		
4	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri			0,50%	1,40%	1,50%	1,60%	1,70%	0,00%	0,00%	1,40%	1,50%		
B.	KOPERASI													
1	Persentase Koperasi Aktif			64,60%	64,67%	64,90%	65,12%	65,35%	64,52%	75,20%	64,67%	64,90%		
2	Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif			30,00%	30,01%	30,05%	30,07%	30,08%	30,00%	0,00%	30,01%	30,05%		
3	Persentase BPR/LKM Aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			3,00%	3,03%	3,06%	3,10%	3,12%	2,87%	2,90%	3,03%	3,06%		
C.	PERDAGANGAN													
1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan			-462.648,17	-452.648,17	-442.648,17	-432.648,17	-422.648,17	-472.648,17	712,91%	-452.648,17	-442.648,17		
2	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Formal			52,27%	53,33%	53,34%	55,31%	56,25%	52,09%	0	53,33%	53,34%		

2.2.3. Pengelolaan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD. Data Capaian OP yang disajikan berdasarkan indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan **Tabel Data capaian OPD** sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WAJO
Jalan Bau Baharuddin No. Tlp/Fax (0485) Sengkang 90912

Ekspor Bersih Perdagangan
Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Ekspor	9.098.083,43	10.132.613,10	9.615.811,49	9.791.001,36	
2	Nilai Impor	9.273.793,21	9.661.992,22	9.896.032,72	10.263.649,53	
3	Nilai Ekspor Bersih (1 - 2)	-175.709,78	470.620,88	-280.221,23	-472.648,17	

Sumber : Dari BPS

Narasi :

Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang untuk ekspor barang yang faktor produksinya menggunakan sumberdaya yang melimpah dan mengimpor barang yang faktor produksinya langka atau mahal jika diproduksi didalam negeri. Keterbukaan ekonomi diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi satu negara. Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang untuk mengekspor barang yang factor produksinya menggunakan sumber daya berlimpah dan mengimpor barang yang factor produksinya langka atau mahal jika produksi didalam negeri. Keterbukaan ekonomi merupakan sarana untuk mempromosikan pertumbuhan melalui penelitian dan pengembangan serta akses pasar yang lebih luas.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 peningkatan Nilai Impor lebih besar dari pada nilai ekspor pada tahun 2022 nilai ekspor lebih besar dari Nilai impor. Dan pada tahun

2023 sampai 2024 Nilai impor kembali mengalami peningkatan. Di Tahun 2025, untuk nilai ekspor dan impor tidak lagi dirilis oleh BPS, yang dirilis hanya Nilai Ekspor Bersih senilai 712.91

**Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal
Tahun 2021 s.d 2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapat bantuan binaan pemda Tahun n	112	112	112	112	-
2	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	215	215	215	215	215
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal	52,09	52,09	52,09	52,09%	0,00%

Sumber : Bidang Perdagangan

Narasi :

Sektor Informal adalah sektor ekonomi yang terdiri dari atas unit usahakecil yang melakukan kegiatan produksi dan/ atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan Lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bejerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga maupun keahlian.

Pada tahun 2019 target cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal sebesar 38,25% dengan realisasi 42,50% dan tahun 2020 target sebesar 46,56% dengan realisasi 46,51% mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 dengan target 54,87% dengan realisasi 52,09%. Rencana tingkat capaian (target) terhadap capaian bina kelompok pedagang guna menentukan persentase yang merupakan perbandingan nilai sebelumnya dari nilai tahun berjalan. Ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020, sehingga tahun 2021 capainnya sebesar 52,09%. Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo pada tahun anggaran 2021 dapat dikatakan berhasil baik dan pada tahun 2022 sampai 2024. Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal sama dengan jumlah pada tahun 2024 yaitu 52,09 % . Di tahun 2025, tidak terdapat bantuan yang diberikan melalui Kementerian Perdagangan kepada para pedagang.

**Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2021 s.d 2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	3.511,82	3.839,14	4.250,56	4.564,55	4.833,11
2	Jumlah PDRB	22.319,74	24.352,78	24.588,57	25.954,22	28.755,53
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,73%	15,76%	17,29%	17,59%	16,81%

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perdagangan

Narasi :

Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi . Adapun pengaruh sektor perdagangan terhadap PDRB antara lain adalah Peningkatan daya beli masyarakat, Adanya peningkatan kualitas produk yang ditawarkan oleh sektor perdagangan serta keberagaman barang dan jasa yang dijual juga turut meningkatkan daya tarik pasar. Produk-produk yang beragam dan berkualitas tinggi dapat menarik lebih banyak konsumen baik di tingkat domestic, Kemajuan teknologi, serta sektor pertanian dan perikanan dimana Kabupaten Wajo sebagai penghasil padi yang cukup melimpah dan hasil perikanan juga sebagai salah satu pemasok hasil laut yang ada di Sulawsei Selatan dan hasilnya dapat dikirim keluar daerah atau wilayah. Pada Tahun 2019 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan realisasi 3.267.41 atau 16,467% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 3.268.52 dengan Rasio 16,53% pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,511.82 denga rasio 15,73% dan pada Tahun 2022 Kontribusi PDRB terhadap sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar 3,839.14 atau 15,76%. Tahun 2023 sampai 2025 kembali mengalami peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebanyak 4.833,11 atau 16,81%.

Jumlah Ekspor + Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ekspor dan Impor Barang dan Jasa	18.427,11	470.620,88	-280,22	-472,65	-712,91
2	PDB	22.319,74	24.352,78	24.588,57	25.954,22	28.755,53
3	Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB	0,83	19,32	-0,01	-1,82	-2,48

Narasi :

Kondisi dan potensi ekonomi pada setiap daerah merupakan modal dasar dan faktor utama dalam penentuan strategis kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan pada setiap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo, serta melihat tingkat daya saing pada setiap sektor tersebut guna mengetahui kedepannya sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah pada Kabupaten Wajo. keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (RasioEkspor + Impor) terhadap PDB. Derajat

kebutuhan ekonomi yang merupakan rasio perdagangan terhadap PDRB ini sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan terbuka antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisi neraca perdagangan bagi mitra dagangnya.

Dari tabel diatas jumlah Ekspor dan Impor barang dan jasa pada tahun 2021 sebanyak 18.427,11 dengan rasio 0,83% tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 470.620,88 atau 19,32 % dan tahun 2023 jumlah ekspor dan impor mengalami penurunan -280,22 atau -0,01% dan tahun 2024 mengalami lagi penurunan sebanyak -472,65 atau -1,82% . Di Tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 712,91 atau 2,48% .Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi domestik dan global.

**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Tahun 2021 s.d 2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kelompok Pengrajin yang Mendapatkan Bantuan binaan Pemda	42	9	83	5	50
2	Jumlah Kelompok Pengrajin	120	644	307	158	123
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	35,0%	1,40%	27,04%	3,16%	40,65%

Sumber : Dari Bidang Perindustrian

Narasi :

Jumlah Kolompok pengrajin yang mendapatkan binaan terhadap industri kecil dan menengah yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi, penerapatan teknologi tepat guna, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, Pendampingan kualitas perizinan usaha dan standarisasi produk.

Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan melalui kegiatan pembangunan industri kabupaten/kota sub kegiatan pembangunan sumber daya industri dan pembangunan sarana dan prasarana industri sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan dan di tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebanyak 83 IKM baik IKM yang berada di dalam sentra IKM maupun IKM yang berada di luar sentra IKM yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Wajo. Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 5 Kelompok IKM. Dan di Tahun 2025 kembali mengalami peningkatan sebanyak 50 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri	853,81	949,09	1.019,27	1.104,54	1.219,3
2	Jumlah PDRB	22.319,74	24.352,78	24.588,57	25.954,22	28.755,53
3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	3,83	3,90	4,15	4,26	4,24

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perindustrian

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri tahun 2021 sebanyak 3,83% dan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun 2024 sebanyak 4,26% mengalami kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung, baik dari sisi permintaan, teknologi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya yang menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor industri, seperti kemudahan berusaha atau program pengembangan industri, dapat mendorong investasi dan ekspansi industri. Kebijakan yang mendorong pengembangan sektor industri juga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB di kabupaten Wajo. Namun, di Tahun 2025 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan 0,02 % menjadi 4,24 %.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB Jasa Industri Rumah Tangga	0,00	0,00	0	0	0
2	Jumlah PDRB sektor Industri	853,81	949,09	1.019,27	1.104,54	1.219,30
3	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	0,00%	0,00%	0	0	0

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perindustrian

Untuk Data Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB pada tahun 2025 tidak diadakan pemilahan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak ada data atau informasi untuk peningatan PDRB untuk Industri Rumah Tangga.

Pertumbuhan Industri Kab.Wajo

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Industri	13.877	15.175	15.928	16.482	16.775
2	Pertumbuhan Industri	6,25%	8,55%	4,72%	3,36%	1,75%

Sumber : Dari Bidang Perindustrian

Narasi :

Pertumbuhan industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana jumlah unit usaha di tahun 2025 sebanyak 16.775 IKM yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Wajo. Ini menggambarkan semakin besarnya animo Masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di situasi dengan iklim usaha dan regulasi dari pemerintah yang memberikan kemudahan bagi setiap warga negara dalam berusaha.

Pertumbuhan Industri Pengolahan Tahun 2021 s/d 2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pertumbuhan industri pengolahan	%	7,95	8,55%	4,72%	3,36%	1,75%

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

Pertumbuhan industri pengolahan di tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan di sebabkan adanya regulasi dari pemerintah memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha serta kebijakan akan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dan di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan sebanyak 3,36 % di sebabkan bahan baku dan bahan penolong mengalami lonjakan harga. Begitu pulan halnya di Tahun 2025 pertumbuhan industri menurun di angka 1,75%

Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM

Tahun 2021 s/d 2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Perkembangan Industri Pengolahan	%	7,95 %	8,55%	4,72%	3,36%	1,75%
Industri Besar	Unit	-	-	-	-	-
Industri Kecil	Unit	868	1295	748	553	292
Industri Menengah	Unit	-	3	5	1	1
UMKM	Unit	13,437	16.445	16.920	17.420	17.940

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

- Industri kecil di tahun 2025 sebanyak 292 unit IKM mengalami penurunan dibanding tahun 2024 sebanyak 553 unit IKM.
- Industri menengah di tahun 2025 sebanyak 1 unit IKM
- Industri besar tidak ada.

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif	15	15	15	15	15
2	Jumlah Seluruh UKM non BPR/LKM	35	50	50	50	50
3	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	42,86%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

Jumlah UKM Non BPR/LKM aktif pada Tahun 2022 persentase UKM Non BPR/LKM mengalami penurunan di dibandingkan di Tahun 2021 menjadi 30%, ini menunjukkan bahwa peran dari UKM non BPR/KM aktif berhasil tumbuh meskipun dihadapkan dengan pandemi covid-19 disaat kredit perbankan mengalami kontraksi, UKM non BPR justru masih berhasil tumbuh. Pertumbuhan tersebut merupakan bukti bahwa UKM non BPR masih bertahan dalam menghadapi tekanan pandemi sepanjang tahun. Pada Tahun 2023 persentase UKM non BPR/LKM Aktif masih sama dengan jumlah pada tahun 2022 yaitu 30,00%. Dan pada tahun 2024 persentase UKM non BPR/LKM Aktif masih bertahan dengan jumlah yang sama pada tahun 2023 yaitu 30,00%. Begitu pula di Tahun 2025 persentase UKM non BPR/LKM masih bertahan sebesar 30%

Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021 s.d 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	12,174	3.008	475	500	520
2	Jumlah Seluruh UMKM	13,437	16.445	16.920	17.420	17.940
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	90,60%	18,29%	2,81%	2,87%	2,90%

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

Dalam kurun waktu lima tahun, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo mencatat Jumlah seluruh UMKM sebanyak 17.940 pelaku usaha. Upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM saat ini sangat dibutuhkan keseriusan dan keberpihakan yang nyata, tegas dan lebih luas dari semua pihak. Selain itu bertambahnya UMKM ini dinilai sebagai bentuk kesadaran terhadap para pelaku usaha agar terus mengembangkan usahanya, khususnya administrasi.

Jumah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Tahun 2021 sebanyak 13.437, di tahun 2022 dan meningkat menjadi 16.445 dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 16.920, Sedangkan pada tahun 2022 Persentase usaha Mikro dan Kecil mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 3008 Usaha Mikro dan kecil dengan persentasi 18,29 %, ini di sebabkan adanya Program Pemerintah dalam hal menciptakan 10.000 Interfrenuer di Kabupaten Wajo sehingga mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Wajo. Dan pada tahun 2023 jumlah seluruh UMKM sebanyak 16.920 dengan penambahan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 475 UMKM. Dan pada tahun 2024 jumlah seluruh UMKM sebanyak 17.420 dengan penambahan jumlah usaha Mikro dan Kecil menjadi 500 dengan presentase 2,87 % .Di Tahun 2025 jumlah usaha mikro dan kecil bertambah sebanyak 520 pelaku usaha sehingga jumlah seluruh UMKM menjadi 17.940 pelaku usaha dengan persentase 2,90 %.

**Persentase BPR/LKM Aktif
Tahun 2021 s/d 2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah BPR/LKM aktif	1	1	1	1	1
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	1	1	1	1	1
3	Persentase BPR/LKM Aktif	100%	100%	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dari Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM

Narasi :

Jumlah BPR/LKM selama kurung watu 5 (Lima) Tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2025 tidak mengalami peningkatan atau tetap berjumlah 1 BPR/LKM aktif.

**Persentase Koperasi Aktif
Tahun 2021 s.d 2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi Aktif	289	291	292	291	481
2	Jumlah Seluruh Koperasi	448	450	451	451	641
3	Persentase Koperasi Aktif	64,51	64,67	64,75	64,52	75,03

Sumber : Dari Bidang Koperasi

Narasi :

Berdasarkan data Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana tersebut pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Jumlah Koperasi aktif adalah 292 unit, dan pada Tahun 2024 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 291 unit, penurunan angka ini terjadi karena adanya 1 unit Koperasi Simpan Pinjam yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perkoperasian, yaitu **KSP LIA SANTI** yang beralamat di Jl. Andi Paggaru Sengkang Kecamatan Tempe. Adapun Persentase Koperasi Aktif pada Tahun 2024 adalah 64,52 %, persentase ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,22 % dari Tahun 2023. Di Tahun 2025 persentase koperasi aktif meningkat menjadi 75,03 %

Koperasi Aktif adalah **Koperasi** yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2024 adalah sebanyak 291 unit atau hanya sekitar 64,52 persen dari jumlah seluruh koperasi yang ada di Wilayah Kabupaten Wajo, dan di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 37 Unit koperasi atau hanya 8,20 persen yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2023. Jumlah koperasi aktif di Tahun 2025 sebanyak 481 unit sedangkan jumlah seluruh koperasi di Tahun 2025 sebanyak 641 unit

Tabel : 2.2.3.15

Data Capaian SPM

No	Indikator SPM	Target Nasional	Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5
	TIDAK ADA			

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo belum mengampuh Standar Pelayanan Minmal perangkat daerah sehingga tidak ada target dan realisasi pada tahun tersebut.

Tabel 2.2.3.16
DATA CAPAIAN SDGs TAHUN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Indikatif Alokasi Anggaran Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	Relisasi Tahun 2024		Keterangan	
		2024	2024				Realisasi Sub.Kegiatan	Realisasi Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI										
Tujuan SDGs 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi									
Target 9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
INDIKATOR SDGs 9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.									
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri									
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM	24 IKM	150.000.000	APBD II	14 Kecamatan	1 Dokumen	110.712.100
		3.31.02.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sentra	3 Sentra	3.478.851.890	APBD II	3 Kecamatan	1 Dokumen	505.373.566
		3.31.02.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Pelayanan	3 Pelayanan	150.000.000	APBD II	14 Kecamatan	1 Dokumen	417.709.100
3.31.02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota									
3.31.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	3.31.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sertifikasi	8 Sertifikat	80.000.000	APBD II	14 Kecamatan	0	-
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional									
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Data Base	1 Data Base	80.000.000	APBD II	14 Kecamatan	1 Dokumen	43.169.600

INDIKATOR SDGs 9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.											
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri										
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM	24 IKM	150.000.000	APBD II	14 Kecamatan		1 Dokumen	110.712.100
		3.31.02.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sentra	3 Sentra	3.478.851.890	APBD II	3 Kecamatan		1 Dokumen	505.373.566
		3.31.02.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Pelayanan	3 Pelayanan	150.000.000	APBD II	14 Kecamatan		1 Dokumen	417.709.100
3.31.02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota										
3.31.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	3.31.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sertifikasi	8 Sertifikat	80.000.000	APBD II	14 Kecamatan		0	-
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Data Base	1 Data Base	80.000.000	APBD II	14 Kecamatan		1 Dokumen	43.169.600
INDIKATOR SDGs 9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.											
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri										
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM	24 IKM	150.000.000				1 Dokumen	110.712.100
		3.31.02.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sentra	3 Sentra	3.478.851.890				1 Dokumen	505.373.566
		3.31.02.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Pelayanan	3 Pelayanan	150.000.000				1 Dokumen	417.709.100

3.31.02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota											
3.31.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	3.31.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sertifikasi	8 Sertifikat	80.000.000				0	-	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional											
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Data Base	1 Data Base	80.000.000				1 Dokumen	43.169.600	
Target 9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.											
INDIKATOR SDGs 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.												
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri											
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	IKM	24 IKM	150.000.000	APBD II	14 Kecamatan		1 Dokumen	110.712.100	
		3.31.02.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sentra	3 Sentra	3.478.851.890	APBD II	14 Kecamatan		1 Dokumen	505.373.566	
		3.31.02.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Pelayanan	3 Pelayanan	150.000.000	APBD II	14 Kecamatan		1 Dokumen	417.709.100	
3.31.02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota											
3.31.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	3.31.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI), IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sertifikasi	8 Sertifikat	80.000.000	APBD II	14 Kecamatan		0	-	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional											
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Data Base	1 Data Base	80.000.000	APBD II	14 Kecamatan		1 Dokumen	43.169.600	

2.2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para *stakeholder*. Isu diartikan juga sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah merujuk pada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh **organisasi perangkat daerah (OPD)** dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di lingkungan pemerintahan daerah dalam memberikan layanan publik secara efektif, efisien, dan berkualitas. Permasalahan ini dapat bersumber dari aspek internal maupun eksternal dan memengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 meskipun telah menunjukkan pencapaian sasaran yang memadai namun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk mendukung pengembangan Sektor Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Wajo.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo dalam pembangunan daerah antara lain adalah:

➤ **Permasalahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Wajo,** sebagai berikut :

1. Kurangnya koperasi yang berkualifikasi sehat.
2. Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan RAT.
3. SDM Pengurus yang masih rendah sehingga laporan tidak bisa dibuat.
4. Pembinaan terhadap koperasi yang masih belum optimal.
5. Kurangnya tenaga pengawas koperasi..
6. Adanya koperasi yang tidak aktif ditandai kepengurusan yang tidak jelas.
7. Penguatan dan Daya Saing Koperasi yang belum optimal
8. Rendahnya pengetahuan SDM pelaku usaha.
9. Pertumbuhan UMKM yang belum maksimal.
10. Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku UMKM dan Pelaku IKM yang belum optimal.
11. Belum optimalnya pengelolaan UMKM.
12. Legalitas perijinan yang belum maksimal.
13. Kurangnya tenaga pembina untuk UMKM.
14. Kurangnya respon pelaku usaha untuk pengembangan usahanya.
15. Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi produk usaha.

➤ **Permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Wajo,** sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam Daerah.
2. Sarana dan Prasarana Pasar dan Pengelolaan pasar rakyat/tradisional belum optimal.
3. Masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri.
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk yang dapat di ekspor.
5. Rendahnya pembinaan kelompok pedagang / usaha formal.
6. Sarana dan prasarana tera/ tera ulang belum terpenuhi sesuai standar.
7. Belum optimalnya penerapan sitem informasi perdagangan.

8. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap barang beredar.
 9. Kurangnya tenaga pengawas perdagangan.
- **Permasalahan bidang perindustrian di Kabupaten Wajo**, sebagai berikut:
1. Rendahnya produktivitas dan daya saing IKM
 2. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaku IKM
 3. Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk dan teknologi industry
 4. Masih rendahnya kualitas, desaign dan kemasan produk IKM
 5. Legalitas perijinan usaha yang masih rendah
 6. SDM pelaku usaha yang masih rendah
 7. Keterbatasan modal usaha
 8. Peralatan yang masih sederhana bagi Pelaku Usaha.

Upaya untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan yang kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh. Dengan meningkatkan daya saing dan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi penggerak dan penguatan bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Daerah Kabupaten Wajo maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Wajo dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi PD.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Wajo. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Kondisi lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang perindustrian kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Kabupaten Wajo.

Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk kerajinan Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan pendampingan usaha diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Wajo.

Rendahnya daya saing produk Kabupaten Wajo yang semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintesis dan/atau produk impor memang masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Pengembangan produk unggulan kecamatan dan daerah diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif bagi pembangunan industri di Kabupaten Wajo. Berkaitan dengan barang/jasa yang beredar, masih banyak produk yang belum memenuhi standar kualitas dan keamanan produk beredar di pasaran.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas antara lain:

1. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan
2. Peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal
3. Peningkatan Penggunaan Produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal
4. Penguatan legalitas dan kelembagaan usaha, fasilitasi serta pendampingan Pelaku Usaha.
5. Peningkatan Promosi dan Pemasaran produk-produk IKM dan UKM melalui Pameran
6. Peningkatan Perang koperasi dalam era globalisasi ekonomi
7. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha dan Perlindungan Konsumen
8. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
9. Penciptaan Lapangan kerja baru untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Identifikasi Permasalahan yang sedang dihadapi dan Isu - Isu Strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Tenik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Sektor Unggulan Daerah (Produk kerajinan Lokal dan kuliner tradisional)	1.Kapasitas SDM dan Pelatihan Terbatas (2) Keterbatasan modal usaha (3) Rendahnya Produktivitas dan daya saing Produk (4) Masih Rendahnya Kualitas, Desaing dan Kemasan Produk IKM (5) Kurangnya Koperasi yang berkualitas Sehat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Perubahan Iklim	Kebijakan Satu Peta dan Tata Ruang (Lokasi pengembangan sentra kuliner/kerajinan harus sesuai dengan zonasi tata ruang dan tidak melanggar kawasan lindung)	a. Revitalisasi UMKM berbasis produk unggulan daerah b. Pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal	(1) Peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal (2) Peningkatan Penggunaan Produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal (3) Peningkatan Promosi dan Pemasaran produk-produk IKM dan UKM melalui Pameran
Penguatan UMKM dan Kewirausahaan	(1) Terbatasnya akses pembiayaan (2) Rendahnya Kapasitas SDM Pelaku Usaha (3) Minimnya Strategi Pemasaran dan Tidak ada identitas merek (brand identity) yang kuat di pasar nasional maupun global (4) Legalitas Perizinan usaha yang belum optimal (5) Kesenjangan digital antara pelaku UMKM di kota dan desa		Perubahan Iklim	Meningkatkan daya saing UMKM dan penciptaan wirausaha produktif	a. Isu pengangguran, khususnya usia muda produktif 'b. Kebutuhan daya saing produk lokal di pasar ASEAN dan nasional	(1) Peningkatan Perang koperasi dalam era globalisasi ekonomi (2) Penciptaan Lapangan kerja baru untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja (3) Penguatan legalitas dan kelembagaan usaha, fasilitasi serta pendampingan Pelaku Usaha

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), pada hakekatnya merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk membangun sinergitas antara RENJA-PD dan RKPD maka diperlukan melakukan *review*, sehingga diharapkan adanya keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara makro dan tujuan pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga.

Rencana program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Renstra dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Wajo yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM pada urusan Industri, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 Dinas Perindagkop & UKM Kab.Wajo merencanakan untuk melaksanakan **17 program** yang dijabarkan dalam **29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan** dan **85 (Delapan Puluh Lima) Sub.Kegiatan** :

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perindagkop & UKM Kab.Wajo berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta hasil analisis kebutuhan secara rinci terlihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Wajo

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. WAJO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				871.219.017	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				871.219.017	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase fasilitasi penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	100 %	425.373.878,21	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase fasilitasi penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	100 %	425.373.878	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	3 Koperasi	212.686.939	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	3 Koperasi	212.686.939	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	212.686.939	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	212.686.939	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi penerbitan izin pembukaan koperasi simpan pinjam yang diterbitkan	3 Koperasi	212.686.939	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi penerbitan izin pembukaan koperasi simpan pinjam yang diterbitkan	3 Koperasi	212.686.939	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Tempe	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	212.686.939,21	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Tempe	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	212.686.939,21	
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100 %	35.873.339	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100 %	35.873.339	
	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dalam Daerah Kab/Kota	250 Koperasi	35.873.339	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dalam Daerah Kab/Kota	250 Koperasi	35.873.339	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	35.873.339,11	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	35.873.339,11	
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi Sehat	100 %	32.270.118	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi Sehat	100 %	32.270.118	

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	35	Koperasi	32.270.118	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	35	Koperasi	32.270.118	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100	Unit Usaha	32.270.118,43	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100	Unit Usaha	32.270.118,43	
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	100	%	10.000.000	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	100	%	10.000.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupten/Kota		Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupten/Kota	50	Orang	10.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupten/Kota		Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupten/Kota	50	Orang	10.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Potensi SDM Koperasi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40	Orang	10.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Potensi SDM Koperasi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40	Orang	10.000.000	Usulan Musrenbang - Desa Labawang Kec.
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	100	%	19.409.116,38	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	100	%	19.409.116,38	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas dan perlindungan koperasi	30	Koperasi	19.409.116,38	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas dan perlindungan koperasi	30	Koperasi	19.409.116,38	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	55	Kelompok Masyarakat	6.469.705,46	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	55	Kelompok Masyarakat	6.469.705,46	
	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	30	Unit Usaha	6.469.705,46	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	30	Unit Usaha	6.469.705,46	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30	Unit Usaha	6.469.705,46	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	30	Unit Usaha	6.469.705,46	
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	100	%	338.283.565	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	100	%	338.283.565	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	188	UMKM	338.283.565	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	188	UMKM	338.283.565	
	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	5	Lembaga	20.000.000	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	5	Lembaga	20.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	30	Orang	25.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	30	Orang	25.000.000	

	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	10	Unit Usaha	100.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	10	Unit Usaha	100.000.000	Usulan Musrenbang di Talloasang Kec. Pitumpanua,
	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	50	Orang	53.283.565	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	50	Orang	53.283.565	
	Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	10	Orang	20.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	10	Orang	20.000.000	
	Pembinaan dan Fasilitas Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	57	Unit Usaha	30.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	57	Unit Usaha	30.000.000	Usulan Musrenbang Desa Ate Labbae Kec. Pitumpanua
	Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1	Kegiatan	35.000.000	Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1	Kegiatan	35.000.000	
	Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	25	Unit Usaha	25.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	25	Unit Usaha	25.000.000	
	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	35	Unit Usaha	30.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	35	Unit Usaha	30.000.000	
1	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor	100	%	10.000.000	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor	100	%	10.000.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan dengan Orientasi skala usaha menjadi skala kecil	62	UMKM	10.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan dengan Orientasi skala usaha menjadi skala kecil	62	UMKM	10.000.000	
	Pembinaan dan Fasilitas Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	2	Unit Usaha	2.500.000	Pembinaan dan Fasilitas Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas Kemitraan dan Rantai Pasok Pengembangan UMKM	2	Unit Usaha	2.500.000	
	Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	30	Unit Usaha	2.500.000	Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	30	Unit Usaha	2.500.000	
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	30	Unit Usaha	2.500.000	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	30	Unit Usaha	2.500.000	
	Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	1	Dokumen	2.500.000	Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	1	Dokumen	2.500.000	

Non Urusan						Non Urusan						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-Rata Realisasi output Kegiatan Perangkat Daerah	100	%	8.853.199.257	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-Rata Realisasi output Kegiatan Perangkat Daerah	100	%	8.853.199.257
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100	%	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100	%	15.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	5.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	5.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	5.000.000
	Pengadaan Mebel	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	5.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	5.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	%	488.950.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	%	488.950.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	428.950.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	428.950.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	%	45.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	%	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	30.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	10.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	17.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100	%	17.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1	Dok	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	45	Data	1.500.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	45	Data	1.500.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	1	Berita Acara	4.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	4.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan dan administrasi Keuangan yang diselesaikan	100	%	8.170.182.143	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan dan administrasi Keuangan yang diselesaikan	100	%	8.170.182.143
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Org/tn	8.166.182.143,04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Org/tn	8.166.182.143,04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pendapatan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	10.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pendapatan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	10.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100	%	19.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai PD yang dilayani	100	%	19.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	10.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	Dokumen	5.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Org	4.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Org	4.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	100	%	87.067.114	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	100	%	87.067.114
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	15	Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	15	Paket	2.000.000
Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	1.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	20	Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	20	Paket	10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.000.000
Penyelenggaraan rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	70.067.114	Penyelenggaraan rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	70.067.114

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1.000.000	
	Urusan Pemerintahan Pilihan						Urusan Pemerintahan Pilihan						
	PERDAGANGAN					1.014.049.679	PERDAGANGAN					1.014.049.679	
9	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	%	10.000.000	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	%	10.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			12	Rekomendasi	2.500.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah rekomendasi penerbitan izin yang diterbitkan	12	Rekomendasi	2.500.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1	Dokumen	2.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	2.500.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			10	Gudang	2.500.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Gudang yang Terdaftar	10	Gudang	2.500.000	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	Dokumen	2.500.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	Dokumen	2.500.000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			10	Gudang	2.500.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Gudang yang Terdaftar	10	Gudang	2.500.000	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4	Laporan	2.500.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4	Laporan	2.500.000	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			10	Gudang	2.500.000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			10	Gudang	2.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1	Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1	Dokumen	2.500.000	
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	%	291.781.317	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	%	291.781.317	Prioritas Pembangunan Daerah

	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola	4	Unit	216.681.317	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola	4	Unit	216.681.317	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	166.244.741,04	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	166.244.741,04	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	33	Unit	25.336.576	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	33	Unit	25.336.576	
	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	1	Laporan	25.100.000	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	1	Laporan	25.100.000	
	Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya		Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	14	Kali	75.100.000	Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya		Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	14	Kali	75.100.000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	50.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	50.000.000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	25.100.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	25.100.000	
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	%	193.295.222	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	%	193.295.222	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota		Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali	30	bahan pokok	193.295.222	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota		Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali	30	bahan pokok	193.295.222	
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	25.275.222	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	25.275.222	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan	15.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan	15.000.000	
	Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	150.000.000	Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	150.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	Laporan	3.020.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	Laporan	3.020.000	
11	Program Pengembangan Ekspor		Persentase Promosi dagang yang diselenggarakan	100	%	512.476.273	Program Pengembangan Ekspor		Persentase Promosi dagang yang diselenggarakan	100	%	512.476.273	Prioritas Pembangunan Daerah

	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan	3	Kali	512.476.272,96	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan	3	Kali	512.476.272,96			
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	Pelaku Usaha	338.986.306,96	Pameran Dagang Nasional	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	Pelaku Usaha	338.986.306,96	
	Pameran Dagang Lokal	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	22	Pelaku Usaha	120.763.266,00	Pameran Dagang Lokal	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	22	Pelaku Usaha	120.763.266,00	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12	Pelaku Usaha	52.726.700,00	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	12	Pelaku Usaha	52.726.700,00	
12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	%	4.641.703	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	%	4.641.703	
	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,ters ulang dan pengawasan		Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertibnaga yang dilaksanakan		Kali	4.641.703	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,ters ulang dan pengawasan		Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertibnaga yang dilaksanakan		Kali	4.641.703	
	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berspa Tera-Ulang	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	##	Unit	2.600.000	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berspa Tera-Ulang	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2010	Unit	2.600.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	450	Orang	1.541.703	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	450	Orang	1.541.703	
	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1	Unit	500.000	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1	Unit	500.000	
13	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam penggunaan Promosi Produk Lokal	100	%	1.855.164	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam penggunaan Promosi Produk Lokal	100	%	1.855.164	
	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri		UMKM	1.855.164	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri		UMKM	1.855.164	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25	UMKM	1.855.164	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25	UMKM	1.855.164	
	PERINDUSTRIAN					263.611.502	PERINDUSTRIAN					263.611.502	
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase Pertambahan Jumlah Industri	100	%	63.849.829	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase Pertambahan Jumlah Industri	100	%	63.849.829	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Laporan	63.849.829	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Laporan	63.849.829	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemilayahan Industri	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemilayahan Industri	1	Dokumen	5.000.000	

	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	10.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	10.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	10.000.000
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	17.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	17.000.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	4.349.829	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	4.349.829
	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	Rekomendasi	2.500.000	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	Rekomendasi	2.500.000
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1	Dokumen	5.000.000	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1	Dokumen	5.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	Laporan	2.500.000	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	Laporan	2.500.000
	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	Rekomendasi	2.500.000	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	Rekomendasi	2.500.000
36	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	%	195.000.000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	%	195.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi	25	IKM	195.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi	25	IKM	195.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Uraian dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	97.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Uraian dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	Dokumen	97.500.000

	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen capaian verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi pengecualian sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan.	1	Dokumen	97.500.000	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen capaian verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi pengecualian sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan.	0	Dokumen	97.500.000
17	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	%	4.761.673	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	%	4.761.673
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	50	data	4.761.673	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	50	data	4.761.673
	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	1.582.224	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	1.582.224
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	1.597.225	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	1.597.225
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Dokumen	1.582.224	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Dokumen	1.582.224
	JUMLAH					11.002.070.455						11.002.070.455

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan dokumen perencanaan disamping dilakukan melalui pendekatan *topdown planning*, juga dilakukan *button up planning*, yaitu perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam pengertian dibidang pemerintahan, *button up planning* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Rancangan Renja 2027 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Wajo disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun kecamatan. Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Wajo

Nama PD : Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

No	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan		
	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	1. Kecamatan Pitumpuan, Kab. Wajo, 2. Kecamatan Bola, Kab. Wajo, 3. Kec. Pammana, Kab. Wajo, 4. Kecamatan Majauleng, Kab. Wajo., 5. Kecamatan Belawa, Kab. Wajo, 6. Kecamatan Tanasitolo, Kab. Wajo, 7. Kecamatan Tempe Kab. wajo 8. Kecamatan Maniangpajo Kab. wajo 9. Kecamatan Gilireng Kab. wajo 10. Kecamatan Penrang Kab. wajo 11. Kecamatan Sajoangng kab. wajo 12. Kecamatan Takdalaala Kab. wajo 13. Kecamatan Sabhangparu Kab. wajo 14 Kecamatan Keera Kab. wajo	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1. [13 Kelompok, 3 Kegiatan] 2. [28 Kelompok, 1 Kegiatan] 3. [5 Orang] 4. [5 Kelompok, 28 Kegiatan, 20 Unit, 1 Kecamatan] 5. [50 Kelompok, 3 Kegiatan] 6. [7 Kelompok, 1 Tahun di 2 Desa] 7. [144 Kelompok] 8. [60 Kelompok, 4 Kegiatan] 9. [50 Kelompok] 10 [30 Kelompok, 4 Kegiatan] 11. [24 Kelompok, 5 Kegiatan] 12. [36 Kelompok, 7 Kegiatan] 13. [0 Kelompok, 10 Tiik, 1 Kecamatan] 14.[9 Kelompok, 1 Kegiatan]	Nama-Nama Pengusul : 1. Andi Bayuni Marzuki, ST 2. ARGA PRASETYA ASHAR, SE 3. ANDI MULYADI 4. MUSTARIN, SE 5. Feri Saputra 6. TAQWA GAFFAR 7. H. Syamsudin A. SH 8. HERMAN ARIF, SH 9. AMRO DALLE, M.Si 10. FERI SURACHMAT S.E., M.A.P 11. ANDI SUMANGE ALAM, SH 12. H. IRFAN SAPUTRA, SH 13. FARHAN PRADANA 14. Drs. ANDI RUSTAN P., M.Si 15. Ir. JUNAIDI MUHAMMAD 16. Ir. H. SUDIRMAN MERU 17. H. ANDI SULEHA SELLE, SH 18. AMRAN, S.Sos, M.Si 19. DIRGA DWI PUTRA ASHAR, SP 20. SULHAN 21. ALIEF KURNIAWAN 22. ANDI MUH. SAIWAN, SP 23. HARYANTO, S.E 24. APRILIANI, S.Kep., NS 25. H. ANDI BESSE SUHAEMI, S.Sos 26. H. MUSTAFA, SH, M.Si
	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM		Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan (Drang)		
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	1. Kelurahan/Desa Kecamatan Belawa, Kab. Wajo 2. Kelurahan/Desa Kecamatan Maniangpajo & Kecamatan Gilireng, Kab. Wajo 3. Kec. Pitumpuan, Kab. Wajo 4. Kelurahan / Desa Kec. Sabhangparu, Kab. Wajo 5. Kelurahan / Desa Kec. Pammana, Kab. Wajo 6. Kecamatan Tanasitolo, Kab. Wajo 7. Kecamatan Takdalaala, Kab. Wajo 8. Kecamatan Majauleng, Kab. Wajo	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	1. 4 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 1 Kegiatan 5. 1 Kegiatan 6. 1 Kegiatan 7. 1 Kegiatan dan 2 Kelompok 8. 5 Kegiatan dan 10 Kelompok	Nama-Nama Pengusul : 1. ARGA PRASETYA ASHAR, SE 2. ANDI TRI SAKTI 3. HERMAN ARIF, SH 4. Feri Saputra 5. AMRAN, S.Sos, M.Si 6. H. ANDI BESSE SUHAEMI, S.Sos 7. SULHAN 8. ANDI SUMANGE ALAM, SH
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1. Kecamatan Pammana dan Kecamatan Sabhangparu, Kab. Wajo,	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2 Kegiatan	Nama-Nama Pengusul : 1. ALIEF KURNIAWAN
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		
	Pembangunan dan Pengoalasan sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Kecamatan Tempe, Kab. Wajo 2. Kecamatan Sabhangparu, Kab. Wajo 3. Pasar Sentral Senggang Kelurahan Iapongloda Kecamatan Tempe, Kab. Wajo 4. Desa Kampiri Kecamatan Pammana, Kab. Wajo 5. Pasar Jalang Kecamatan Sajoangng, Kab. Wajo 6. pasar ikan Tanjung Manik, Kab. Wajo 7. PASAR BELAWA, Kab. Wajo		1. (3 Kegiatan) 2. (1 Kegiatan) 3. (1 Kegiatan) 4. (1 Kegiatan) 5. (2 Kegiatan) 6. (1 Kegiatan) 7. (1 Pasar)	Nama-Nama Pengusul : 1. H. RISMAN LIKMAN, SP, M.Si 2. RAHMAN RAHMISE 3. Ir. H. SUDIRMAN MERU 4. ALIEF KURNIAWAN 5. ASRIJAYA LATIF 6. HARYANTO, S.E 7. ANDI TRI SAKTI

Tabel 2.6

Usulan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2027 Kabupaten Wajo

Nama PD : Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

No	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha	Tellesang Kec. Pitumpanua, Desa Parigi Kec. Takkaialala, Soru Kec. Takkaialala	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha (Unit Usaha)	10 Unit Usaha	Hasil Usulan Musrenbang
	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Desa Ale Lebbae Kec. Pitumpanua	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk (Unit Usaha)	35 Unit Usaha	Hasil Usulan Musrenbang
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Desa Labawang Kec. Keera	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	40 Orang	Hasil Usulan Musrenbang

Setelah diperoleh kesepakatan, maka dilakukan penggabungan dengan Rancangan Renja OPD yang telah disusun oleh tim penyusun Renja OPD yang selanjutnya disajikan kedalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.7

Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD Kabupaten Wajo

Nama OPD : Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Non Urusan					Non Urusan					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-Rata Realisasi output Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	7.256.704.273	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-Rata Realisasi output Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	7.256.704.273	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.500.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan dan administrasi Keuangan yang diselesaikan	100 %	6.562.757.159	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan dan administrasi Keuangan yang diselesaikan	100 %	6.562.757.159	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Org/bn	6.560.757.159	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Org/bn	6.560.757.159	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pendapatan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	90.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase laporan pendapatan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	90.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	90.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	90.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	100	%	79.067.114	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	100	%	79.067.114
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	2.000.000
Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	2.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	5.000.000
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	70.067.114	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	70.067.114
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100	%	30.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100	%	30.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	%	436.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100	%	436.250.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	421.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	421.250.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	%	48.630.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100	%	48.630.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	28.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	28.630.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Dinas Perindagkop dan UKM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				315.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				315.000.000			
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	%	70.000.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	%	70.000.000	
	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dalam Daerah Kab/Kota	250	Kop era si	70.000.000	Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi dalam Daerah Kab/Kota	250	Kop era si	70.000.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250	Unit Usaha	70.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250	Unit Usaha	70.000.000	
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi Sehat	100	%	30.000.000	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi Sehat	100	%	30.000.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Kop era si	30.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya		Kop era si	30.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100	Unit Usaha	30.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100	Unit Usaha	30.000.000	
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	100	%	30.000.000	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	100	%	30.000.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota				Orang	30.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota		Orang	30.000.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Potensi SDM Koperasi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20	Orang	30.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Potensi SDM Koperasi	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20	Orang	30.000.000	Usulan Musrenbang - Desa Labawang
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			100	%	185.000.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	100	%	185.000.000	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				UMKM	185.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan		UMKM	185.000.000	

	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha (Unit Usaha)	10	Unit Usaha	100.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha (Unit Usaha)	10	Unit Usaha	100.000.000	Usulan Musrenbang - Kelurahan Tellesang - Desa Parigi
	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan (Orang)	30	Unit Usaha	50.000.000	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan (Orang)	30	Unit Usaha	50.000.000	
	Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM (Kegiatan)	1	Kegiatan	25.000.000	Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM (Kegiatan)	1	Kegiatan	25.000.000	
	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk (Unit Usaha)	20	Unit Usaha	10.000.000	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk (Unit Usaha)	20	Unit Usaha	10.000.000	Usulan Musrenbang - Desa Ale Lebbae
	Urusan Pemerintahan Pilihan						Urusan Pemerintahan Pilihan						
	PERDAGANGAN					853.566.360,94	PERDAGANGAN					853.566.361	
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	%	300.000.000	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	%	300.000.000	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola		Unit	195.005.400	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola		Unit	195.005.400	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	195.005.400	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	195.005.400	
	Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya		Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan		Kali	104.994.600	Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya		Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan		Kali	104.994.600	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	104.994.600	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	104.994.600	
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	%	180.000.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	%	180.000.000	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota		Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali		bahan pokok	180.000.000	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota		Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali		bahan pokok	180.000.000	
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	30.000.000	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	30.000.000	

	Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	150.000.000	Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	150.000.000	
12	Program Pengembangan Ekspor		Persentase Promosi dagang yang diselenggarakan	100	%	348.759.286	Program Pengembangan Ekspor		Persentase Promosi dagang yang diselenggarakan	100	%	348.759.286	Prioritas Pembangunan
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan			348.759.286	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan			348.759.286	
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	Pelaku Usaha	348.759.285,94	Pameran Dagang Nasional	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	Pelaku Usaha	348.759.285,94	
13	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	%	24.807.075	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	%	24.807.075	
	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan		Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan			24.807.075	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan		Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan			24.807.075	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera-Tera Ulang	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	200	Unit	24.807.075	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera-Tera Ulang	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	200	Unit	24.807.075	
	PERINDUSTRIAN					84.000.000	PERINDUSTRIAN					84.000.000	
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase Pertambahan Jumlah Industri	100	%	67.000.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase Pertambahan Jumlah Industri	100	%	67.000.000	Prioritas Pembangunan
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Laporan	67.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Laporan	67.000.000	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	17.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	17.000.000	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	17.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	17.000.000	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1	Dokumen	13.000.000	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1	Dokumen	13.000.000	
17	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	%	17.000.000	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	%	17.000.000	

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	50	data	17.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	50	data	17.000.000	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	17.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	17.000.000	
JUMLAH					8.509.270.634	JUMLAH					8.509.270.634	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional), menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

RPJP-Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional). Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM-Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program-program kementerian / lembaga dan lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik dan berkualitas digambarkan dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028.

Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 17 prioritas Nasional , yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal;

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Dan adapun **17 Prioritas Presiden**, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan Gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;

16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga;

Telahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Sulawesi Selatan

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Visi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 adalah "**Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter**". Berdasarkan visi dan misi yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun sesuai misi yang diemban. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan Tiga Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2025-20230 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan;

Keterkaitan Visi ,Misi Sulawesi Selatan Maju Dan Berkarakter dengan OPD Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Sektoral lainnya:

- 1 Pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.
- 2 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel Membangun infrastruktur dalam menguatkan interkonektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.
- 3 Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter Memenuhi akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

TELAAHAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pemerintah Pusat dalam menunjang tujuan nasional menetapkan Visi pembangunan nasional tahun 2025 - 2029 yakni "**Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**", mengandung pengertian bahwa pembangunan diperlukan kerjasama putra - putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita - cita Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan industri dan Perdagangan. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional dan Perdagangan disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis financial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Visi pembangunan Industri dan perdagangan Indonesia pada tahun 2030 adalah menjadi negara industry dan dunia usaha tangguh dengan cirri-ciri seperti yang telah disampaikan diatas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara untuk tahun 2025-2030 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju barudan perdagangan denga dunia usaha dengan peningkatan ekspor, dan visi yaitu Memantapkan daya saing basis industri dan perdagangan manufaktur yang berkelanjutan (sustainable) serta terbangunnya pilar industri dan dunia usaha andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi.
2. Terseleksikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah.
3. Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar.
4. Tercapainya peningkatan industri penunjang komponen.

5. Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi)
6. Tercapainya Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non- migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
7. Meningkatnya konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sesuai dengan visi diatas, maka misi lima tahun sampai dengan tahun 2025-2030 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri
2. Mendorong peningkatan penguasaan domestik dan internasional
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau jawa
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDRB
8. Mendorong peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
9. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
10. Memfasilitasi pemberdayaan dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
11. Memfasilitasi pasar produk dalam negeri;
12. Mendorong optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
13. Mewujudkan kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional;
14. Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan

TELAAHAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUL-SEL

Kepala pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian di pimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih membuat panduan dan arah kebijakan terkait program kerja yang akan dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun pemerintahan kedepan, visi dan misi yang diusung gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah diharapkan menjadi petunjuk atas program - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Visi Gubernur **Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER** adalah refleksi dari visi dan misi Presiden, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam mendukung target Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, untuk meningkatkan pendapatan per kapita setara dengan negara maju, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta mengurangi intensitas gas rumah kaca menuju *Net Zero Emissions*. Dengan memadukan potensi lokal dan kebijakan nasional, serta berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, kami yakin dapat membawa Sulawesi Selatan menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera. serta memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia dan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Arah pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan tergambar dalam uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan kesehatan untuk semua ;
2. Pendidikan berkualitas dan merata ;
3. Perlindungan sosial yang adaptif ;
- 4. Pengembangan iptek, inovasi dan produktifas ekonomi ;**
5. Penerapan prinsip ekonomi hijau ;
6. Transformasi digital dan birokrasi efisien ;
7. Integrasi ekonomi regional dan global ;
8. Pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat ekonomi ;
- 9. Pemerintahan yang berintegritas dan inovatif ;**
10. Ketaatan hukum dan stabilitasi demokrasi ;
11. Stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan ;
12. Kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah dan peningkatan daya saing ;
13. Kemajuan budaya dan keberagaman ;
14. Keluarga berkualitas dan kesetaraan sosial ;
15. Ketahanan air, pangan dan energi ;
16. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ;
17. Ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dari 17 (tujuh belas) arah pembangunan Gubernur terpilih maka ringkasan program kerja yang berkaitan dengan urusan Koperasi dan UMKM terdapat pada **program kerja ke-32 yaitu Melanjutkan peningkatan daya saing UMKM dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Program kerja ke - 33 Pelatihan, Akses modal, pemasaran dan sertifikasi halal untuk UMKM di Sulawesi Selatan.** Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan, akses modal, pemasaran, serta bantuan sertifikasi halal.

Dalam lima tahun kedepan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dimana pada tataran makro, kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan koperasi dan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tugas utama yang di emban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan adalah memperkokoh perekonomian Sulawesi Selatan melalui penciptaan KUKM - KUKM baru berbasis wilayah agar dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan roda perekonomian wilayah, mengurangi angka kejahatan dan berperan langsung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemampuan wilayah dan sumberdaya lokal.

Pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga di arahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi yang saling berhubungan untuk menjamin ketersediaan produk dan keberlangsungan usaha melalui pola yang sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi melalui kontribusi nyata pemerintah daerah yang berada di wilayah dan memadukan empat pilar yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup, Aparatur atau Birokrasi, dan dengan tetap memperhatikan peran swasta atau dunia usaha.

Adapun **Tujuan Dinas Koperasi dan UKM** dalam mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah

- 1. Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor Koperasi dan UKM, dan**
- 2. Mewujudkan akuntabilitas perangkat daerah yang adaptif**

Adapun **sasaran** yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas ;
2. Meningkatnya usaha kecil menjadi wirausaha ;
3. Terwujudnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Kementerian Koperasi dan UKM

Pemerintah Pusat dalam menunjang tujuan nasional menetapkan Visi pembangunan nasional tahun 2025 - 2029 yakni "**Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**", mengandung pengertian bahwa pembangunan diperlukan kerjasama putra - putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan

tekad sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita - cita Indonesia Emas 2045. Adapun Misi tertuang dalam **ASTA CITA yang menjadi Prioritas Nasional 2025 - 2029** dimaksud adalah :

a. Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

b. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

c. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

d. Asta Cita 4: Memperkokoh sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

e. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

f. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan korupsi.

g. Asta Cita 7: Memperkokoh reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

h. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Untuk mendukung ASTA CITA diatas telah tertuang 17 program prioritas Presiden adalah sebagai berikut :

1. Mencapai swasembada pangan energi dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan huniat berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan . perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
- 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha** dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota- kota inovatif - karkteristik - mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestraian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maka urusan Koperasi dan UMKM termaktub dalam Asta Cita ke-3 : **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.** Dan terurai dalam program prioritas ke 14 **Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha** dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif - karakteristik - mandiri lainnya.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
-1	-2	-3	-4
A	Nasional (Perindustrian)		
1	Target Kontribusi Industri terhadap PDB	RPJMN 2025-2029	
2	Penguatan Kawasan Industri	RPJMN 2025-2029	
3	Strategi Investasi	RPJMN 2025-2029	
4	Hilirisasi & TKDN	RPJMN 2025-2029	
5	Stimulus Ekonomi untuk Industri Manufaktur	RPJMN 2025-2029	
A	Nasional (Perdagangan)		
1	Strategi Ekspor dan Pasar Global	RPJMN 2025-2029	
2	Program Prioritas Kemendag 2025	RPJMN 2025-2029	
3	Diplomasi Perdagangan dan Akses Pasar	RPJMN 2025-2029	
4	Deregulasi dan Ekspansi ke Pasar Baru	RPJMN 2025-2029	
5	Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi	RPJMN 2025-2029	
6	Ibu Kota Nusantara sebagai Proyek Strategis (IKN)	RPJMN 2025-2029	
A	Nasional (Koperasi dan UKM)		
1	Penguatan peran UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan (Asta Cita)	RPJMN 2025-2029	
2	Program Kementerian Koperasi dan UKM	RPJMN 2025-2029	
3	Strategi pemberdayaan UMKM dan Koperasi	RPJMN 2025-2029	
4	Pemanfaatan teknologi dan data sebagai alat monitoring dan percepatan transformasi	RPJMN 2025-2029	
5	Kebijakan afirmatif untuk mendorong skala usaha, peningkatan skill, akses pembiayaan, dan keterlibatan dalam rantai global	RPJMN 2025-2029	
B	Provinsi (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)		
1	Penguatan sektor industri hilir berbasis bahan baku lokal	RPJPD Sulsel 2025-2045	
2	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	RPJPD Sulsel 2025-2045	
3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor industri	RPJPD Sulsel 2025-2045	
4	Penguatan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) melalui digitalisasi layanan, pengembangan produk/jasa baru, serta peningkatan peran mereka sebagai sumber pendapatan daerah	RPJPD Sulsel 2025-2045	
5	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk rantai nilai industri halal dan pengembangan ekosistem industri halal sebagai bentuk diversifikasi industri	RPJPD Sulsel 2025-2045	
6	Pengembangan hilirisasi berbasis SDA unggulan, mencakup berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, sagu, singkong, industri makanan & minuman, tekstil, alas kaki, kimia, serta industri kendaraan listrik (EV), elektronik, dirgantara, dan mesin. Juga penekanan pada industri padat karya, teknologi tinggi, serta orientasi ekspor	RPJPD Sulsel 2025-2045	
1	Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor, dengan tujuan meningkatkan keterkaitan ekonomi dan partisipasi dalam rantai nilai global	RPJPD Sulsel 2025-2045	
2	Peningkatan ekspor produk dan jasa kreatif, mendorong pemanfaatan FTA/CEPA, memperkuat digitalisasi layanan logistik, serta memastikan kualitas produk untuk menghadapi persaingan global	RPJPD Sulsel 2025-2045	
3	Pengembangan sentra dan kawasan industri, pemasaran digital (marketplace/pasar digital), sertifikasi dan standarisasi produk UMKM, serta kemudahan ekspor langsung (direct export).	RPJPD Sulsel 2025-2045	
4	Peningkatan kualitas kemasan, HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan akses pasar ekspor diarahkan sebagai langkah untuk menambah nilai tambah produk komoditas unggulan (beras, jagung, rumput laut), serta memperkuat ekonomi kreatif	RPJPD Sulsel 2025-2045	
B	Provinsi (KOPERASI DAN UKM)		
1	Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP)	periode 2025-2029	
2	Fasilitasi Legalitas UMKM dan Sertifikasi Halal	periode 2025-2029	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Sesuai Perencanaan Staretgis Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD. Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur dan target selama 5 tahun ke depan.

Adapun **Tujuan** dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo adalah :

" Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan sektor Industri dan Perdagangan yang berperan utama dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah."

2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan serta berdasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap perangkat daerah. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II), yang akan dijabarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan 5 (Lima) sasaran yang ingin dicapai selama 5 Tahun kedepan.

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- a. Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri
- b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM.
- c. Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif
- d. Meningkatnya Volume Perdagangan
- e. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja OPD. Tujuan dan sasaran termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2027
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan sektor Industri dan Perdagangan yang berperan utama dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri	Persentase Koperasi Sehat	%	6,80%
		Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM	Pertumbuhan UMKM	%	2,57%
		Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif	Persentase Pertumbuhan Industri	%	5,35%
		Meningkatnya Volume Perdagangan	Nilai Ekspor Barang	Nilai	-442.648,17
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,40

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, kegiatan dan sub.kegiatan OPD terhadap SPM.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Untuk Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo dukungan rencana program, kegiatan dan sub.kegiatan terhadap Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.1
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan OPD terhadap SPM Tahun 2026

No	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4		

Pada tabel di atas untuk Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo belum mengampuh SPM serta target ,pencapaian kinerja dan pagu indikatif tahun 2027.

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS

SDGs/TPB ini adalah pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kebijakan perencanaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dalam bentuk indicator, kegiatan dan program yang terukur dan juga indikasi dukungan pembiayaan sehingga bisa dikatakan jika semua target TPB/SDGs di tingkat nasional sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Adapun dukungan rencana program kegiatan dan sub kegiatan dan indikasi dukungan anggaran terhadap TPB/SDG tahun 2027 pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS Tahun 2024

No	Indikator TPB/SDGS	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4		
1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri	85%	170.000.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1 Laporan	170.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	30.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	80.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 Dokumen	20.000.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri	100%	20.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kot	Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi	25 IKM	20.000.000
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	100%	20.000.000
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan sistem informasi industri berbasis SIINas	27 Data	20.000.000
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS	1 Dokumen	10.000.000
2	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri	85%	170.000.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan	1 Laporan	170.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	30.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	80.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 Dokumen	20.000.000

		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri	100%	20.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kot	Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi	25 IKM	20.000.000
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	100%	20.000.000
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan sistem informasi industri berbasis SIINas	27 Data	20.000.000
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS	1 Dokumen	10.000.000
3	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri	85%	170.000.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1 Laporan	170.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	30.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	80.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 Dokumen	20.000.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri	100%	20.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kot	Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi	25 IKM	20.000.000
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000

		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	100%	20.000.000
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan sistem informasi industri berbasis SIINas	27 Data	20.000.000
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS	1 Dokumen	10.000.000
4	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri	85%	170.000.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1 Laporan	170.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	30.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	80.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 Dokumen	20.000.000
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri	100%	20.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kot	Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi	25 IKM	20.000.000
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	100%	20.000.000
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan sistem informasi industri berbasis SIINas	27 Data	20.000.000
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS	1 Dokumen	10.000.000

4.3. Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo untuk mencapai sasaran tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan pencapaian sasaran terukur yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (Sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis daya tersebut sebagai masukan keluaran (ouput) dalam bentuk barang/jasa.Untuk merealisasikan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo menetapkan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan Tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 demi tercapainya apa yang diharapkan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Disperindagkop dan UKM perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Arah kebijakan prioritas yang diamanatkan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam RPD Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 diimplementasikan melalui program , kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasar pada Rencana Strategis 2025-2029 untuk tahun 2027 ,Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenang dari Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

Adapun program yang dilaksanakan sebanyak **11 Program, kegiatan** sebanyak **18 Kegiatan** dan **38 Sub Kegiatan** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

e) Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor

g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi;

a. Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

a. Penilaian kesehatan Koperasi simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah kabupapten/Kota;

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**
 - a. ***Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan***
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha
 - Pelatihan dan Pendampingan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM
 - Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM
 - Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk
6. **Program Peningkatan sarana Distribusi perdagangan ;**
 - a. ***Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan***
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. ***Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya***
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
7. **Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**
 - a. ***Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;***
 - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
8. **Program Pengembangan Ekspor;**
 - a. ***Penyelenggaraan Promosi dan Misi dagang bagi produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota***
 - Pameran dagang Nasional.
9. **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen ;**
 - a. ***Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-Tera Ulang;***
 - Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera-Tera Ulang
10. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;**
 - a. ***Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana Industri
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

11. Program pengelolaan sistem informasi industri Nasional;

a. Penyediaan Informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wajo pada tahun 2027 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Wajo

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan)/Sub-Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Perkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Non Urusan														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.571.704.273,06							9.300.871.782,88	Dinas Perindagkop dan UKM
2.17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						7.571.704.273,06							9.300.871.782,88	
2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/WOTA	Kata-Rata Realisasi setiap Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	7.236.704.273,06						100%	8.948.821.308,36	
2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	10.000.000,00						100%	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	3	2	Dokumen	2.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2	4.000.000,00	
2.17.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	Dokumen	1.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1	2.500.000,00	
2.17.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	Dokumen	1.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1	2.500.000,00	
2.17.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	Laporan	1.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1	2.000.000,00	
2.17.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	Laporan	2.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2	3.000.000,00	
2.17.01.2.01.0010		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perentase Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	2	1	Renc. Acara	1.500.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1	4.000.000,00	
2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Laporan Keuangan dan administrasi keuangan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	6.562.757.159,06						100%	8.341.148.314,36	
2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	57	57	56	Orang/bul. an	6.500.757.159,06	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	PAU ,DANA ALOKASI UMUM (DAU)			56	8.119.148.314,36	
2.17.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	Laporan	2.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1	2.000.000,00	
2.17.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perentase laporan pendapatan yang disusun dan diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	90.000.000,00						100%	10.000.000,00	
2.17.01.2.04.0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	1	1	Dokumen	90.000.000,00	Kab. Wajo, Sempu Kecamatan, Sempu kel'Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1	10.000.000,00	
2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase administrasi umum yang berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	79.067.114,00						100%	83.102.994,00	
2.17.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	15	15	15	15	Paket	2.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15	2.000.000,00	
2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Dididirikan	20	20	20	20	Paket	2.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20	1.000.000,00	
2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dididirikan	20	20	20	20	Paket	5.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Buku Pabbuku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20	10.000.000,00	
2.17.01.2.06.0008		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	Laporan	70.067.114,00	Kab. Wajo, Sempu Kecamatan, Sempu kel'Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12	70.102.994,00	
2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintah Daerah	Perentase BMD Perangkat Daerah pembiayaan urusan yang diadakan	100%	100%	100%	100%	30.000.000,00						100%	10.000.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub-Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Perkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas			Target Kinerja	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.07.0004	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	0	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Batu Pabbu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				4	5.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0	1	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Batu Pabbu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				4	5.000.000,00	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	436.250.000,00						100%	436.950.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Batu Pabbu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				12	10.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12 Laporan	421.250.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Batu Pabbu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				12	428.950.000,00	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Meubel Daerah Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	48.630.000,00						100%	45.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	20	20	10 Unit	28.630.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Batu Pabbu	PAJ, DANA ALOKASI UMUM (DAU)				20	30.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	7	7 Unit	10.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Batu Pabbu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				7	5.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Rehabilitasi	1	1	1	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Wajo, Tempe, Batu Pabbu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				1	10.000.000,00	
1	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI	Pemantauan, Pengawasan dan Pemertukaran Koperasi	100%	100%	100%	100%	70.000.000,00						100%	36.574.346,86	
	2.17.03.2.01	Pemantauan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dipantau dan diawasi dalam daerah Kab/Kota	400	35	35	250 Unit Usaha	70.000.000,00						250	36.574.346,86	
	2.17.03.2.01.0004	Poliklanan Proses Pemertukaran dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemertukaran dan Pengawasan	400	200	20	250 Unit Usaha	70.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Koperasi	250	36.574.346,86	
1	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Pemertukaran Koperasi Sehat	100%	100%	100%	100%	30.000.000,00						100%	32.909.714,96	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200	30	35	35 Unit Usaha	30.000.000,00						100	32.909.714,96	
	2.17.04.2.01.0001	Poliklanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200	40	35	100 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Koperasi	100	32.909.714,96	
5	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pemertukaran koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	100%	100%	100%	100%	30.000.000,00						100%	10.195.411,90	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	250	0	0	50 Orang	30.000.000,00						40	10.195.411,90	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Penanaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Pengetahuan Perkoperasian	250	0	0	20 Orang	30.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Anggota Koperasi	40	10.195.411,90	
7	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemertukaran Perindustrian, Minusaha Baru	100%	100%	100%	100%	185.000.000,00						100%	275.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Konsultasi, Komunikasi Perencanaan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, konsultasi, pelatihan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	1287	178	0	937 UMKM	185.000.000,00						975	275.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0008	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha	Jumlah UMKM yang diberikan Pemulihan Usaha	40	5	18	10 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			UMKM	30	150.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0015	Penelitian dan Peningkatan pemanfaatan Sistem Pelaporan Pembukaan Pencatatan Keuangan hasil rekrut UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Peningkatan Pelaporan Berdasarkan Pencatatan Keuangan	300	84	0	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			UMKM	35	60.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0014	Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Awal Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	688	520	130	3 Kegiatan	25.000.000,00	Kab. Wajo, Belawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			UMKM	500	35.000.000,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub.Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Pertemuan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.02.2.01.0011	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dilatih dan dibekali dalam mengikuti Sertifikasi dan Standardisasi Produk	57	50	0	20 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Polaku UMKM	55	30.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						937.566.380,94							870.809.174,77	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						853.566.380,94							825.600.534,77	
	3.30.03	PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	100%	100%	100%	300.000.000,00						100%	251.546.495,28	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola	2	4		4 Unit	195.005.400,00						4	391.546.495,28	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2	4	0	1 Unit	195.005.400,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				4	201.546.495,28	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelola sarana dan prasarana distribusi perdagangan	14	12		14 Kali	104.994.600,00						14	50.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kapada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	1	1 Dokumen	104.994.600,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				1	50.000.000,00	
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	180.000.000,00						100%	222.072.441,16	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali	30 Bahan Pokok	10		30 Bahan Pokok	180.000.000,00						30	222.072.441,16	
	3.30.04.2.02.0001	Pemeriksaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemeriksaan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	12	1	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				12	40.072.441,16	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berjangka dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berjangka dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2	1	1	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				12	182.000.000,00	
	3.30.06	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Promosi Dagang yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	340.759.285,94						100%	340.000.703,33	
	3.30.06.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan	5	4		3 Kali	340.759.285,94						5	340.000.703,33	
	3.30.06.2.01.0001	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilibatkan dalam Rencanan Dagang	17	14	15	10 Pelaku Usaha	340.759.285,94	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				20	349.000.703,33	
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMER	Persentase alat ukur takar timbangan dan pengukurannya (NTP) berstandar nasional yang berlaku	100%	100%	100%	100%	24.807.075,00						100%	2.671.295,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan terbit ulang yang dilaksanakan	12 Kali	12		12 Kali	24.807.075,00						12	2.671.295,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Akt Ular, Akt Tandar, Akt Ulang, dan Akt Perolehan Ulang ulang	2070	790	750	200 Unit	24.807.075,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				2070	2.671.295,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						67.000.000,00							43.118.240,00	
	3.31.03	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri	100%	100%	100%	100%	67.000.000,00						100%	43.500.000,00	
	3.31.03.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	1		1 Laporan	67.000.000,00						1	43.500.000,00	
	3.31.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	1	1	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			IKM	1	10.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	1	1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			IKM	1	11.000.000,00	

No	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan/Sub.Kegiatan)	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Perkiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target Kinerja	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
(3)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.11.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemasaran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemasaran Serta Masyarakat	1	1	1	1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Ge/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DKM	1	17.500.000,00	
	3.11.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan jaminan Produk Hasil (PH) di level Kabupaten/kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk hasil yang dapat dilayani	1	0	0	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Ge/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DKM	1	5.000.000,00	
	3.11.04	PROGRAM PENDELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terbuka	100	100	100	100	17.000.000,00						100	1.618.248,00	
	3.11.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	50	1	1	50 Data	17.000.000,00						50	1.618.248,00	
	3.11.04.2.01.0001	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	1	1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Wajo, Semua Kecamatan, Semua Ge/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			DKM	1	1.618.248,00	
		JUMLAH						4.309.270.634,00							10.171.600.956,05	

BAB. V

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir priode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir priode RPJMD dapat dicapai melalui Renstra.

5.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 dan tahun 2028 serta kondisi akhir Renstra tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja (Tahun)		Kondisi Akhir Renstra
			2027	2028	
1	2	3	4	5	6
Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri	Persentase Koperasi Sehat	%	6,80%	7,00%	8,00%
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM	Pertumbuhan UMKM	%	2,57%	3,01%	3,30%
Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif	Persentase Pertumbuhan Industri	%	5,35%	6,40%	7,2%
Meningkatnya Volume Perdagangan	Nilai Ekspor Barang	Nilai	-442.648,17	-432.648,17	-412.648,17
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,40	82,70	83,50

5.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2026 dan tahun 2027 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Asumsi Capaian 2026	Target 2027
1	2	3	4
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,6%	4,8%
2	Pertumbuhan Industri	4,95%	5,35%
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	6,4%	8,4%
4	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor industri	1,4%	1,5%
5	Ekspor Bersih Perdagangan	-452.648,17	-442.648,17
6	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	53,33%	53,34%
7	Persentase Kopersi Aktif	64,67%	64,90%
8	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	30,01%	30,05%
9	Persentase BPR/LKM Aktif	100%	100%
10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	3,03%	3,06%

5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD Pengampu SPM

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No	Indikator SPM	Target Nasional	Asumsi Capaian 2026	Target 2027
1	2	3	4	5
	TIDAK ADA			

Pada tabel di atas bahwa Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo belum mengampuh Standar Pelayanan Minimal perangkat daerah dan tidak ada Asumsi capaian 2026 serta target Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2027.

5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki arti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaminkeadilan masyarakat, memastikan tata kelola yang sifatnya menjaga dan meningkatkan kualitas dari generasi ke generasi dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. SDGs/TPB ini adalah komitmen nasional dan global yang memiliki 17 tujuan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Hal yang menjadi prioritas guna mencapai target dari SDGs/TPB ini adalah pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kebijakan perencanaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dalam bentuk indicator, kegiatan dan program yang terukur dan juga indikasi dukungan pembiayaan sehingga bisa dikatakan jika semua target TPB/SDGs di tingkat nasional sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk asumsi capaian TPB/SDGs tahun 2026 dan penetapan target TPB/SDGs tahun 2027 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4
Penetapan TPB/SDGS Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Asumsi Capaian	Target	KETERANGAN
				2026	2027	
Tanpa Kemiskinan						
Tujuan 1	: Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Apapun					
Target 1.a	: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.					
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Bidang Perindustrian	%	100	100	
Pertumbuhan Ekonomi						
Tujuan 8	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua					
Target 8.1	: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Bidang Perindustrian	%	4,6%	4,7%	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Bidang Perindustrian	%	4,6%	4,7%	
Target 8.02	: Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.					
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Bidang Perindustrian	%	4,6%	4,7%	
Target 8.3	: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Bidang Pemberdayaan UMKM	%	2,5%	2,5%	
Target 8.10	: Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.					
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Bidang Perindustrian	Rp	5.656.400.000	5.656.400.000	
Pertumbuhan Ekonomi						
Tujuan 9	: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.					
Target '9.3	: Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.					
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Bidang Perindustrian	RP	11.500.000.000	11.600.000.000	
9.3.2*	PDB per kapita.	Bidang Perindustrian	%	4,6%	4,7%	
Tujuan 11	: menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan					
Target 11.03	: Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.					
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Koperasi	448	448	

NB :

Industri Manufaktur Adalah : Industri yang mencakup Industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Dan ini disematkan pada perusahaan Perakitan, biasanya mengacu pada perusahaan yang bergerak dibidang Elektronik dan Otomotif.

BAB. VI

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kab.Wajo;
2. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo;
3. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kab.Wajo Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2027 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.
4. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027 pada Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo;
5. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2027;
5. Diharapkan dengan tersusunnya RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik Sekertariat dan Bidang-bidang agar konsisten dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, selanjutnya Renja Tahun 2027 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Wajo tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kab.Wajo.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub.kegiatan. Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran 2027.

Sengkang, 02 April 2026

**Plt. Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo**

Drs. H. ANDI CAKUNU, M.Si
NIP . 19690424 199403 1 008